



Katalog/Catalogue: 7203002
ISSN 2745-6684



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

*Financial Statistics of Provincial Government
2024 and 2025*

2024 dan 2025

Volume 21, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-STATISTICS INDONESIA**

Katalog/Catalogue: 7203002
ISSN 2745-6684

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

*Financial Statistics of Provincial Government
2024 and 2025*

2024 dan 2025

Volume 21, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-STATISTICS INDONESIA**

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2024 dan 2025

*Financial Statistics of Provincial Government
2024 and 2025*

Volume 21, 2025

Katalog/Catalogue: 7203002

ISSN: 2745-6684

Nomor Publikasi/Publication Number: 06300.25011

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv+87 halaman/pages

Penyusun Naskah/Manuscript Drafter:

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
Directorate of Financial, Information Technology, and Tourism Statistics

Penyunting/Editor:

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
Directorate of Financial, Information Technology, and Tourism Statistics

Pembuat Kover/Cover Designer:

Direktorat Diseminasi Statistik
Directorate of Statistical Dissemination

Penerbit/Publisher:

©Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia

Sumber Ilustrasi/Illustration Source:

freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

It is prohibited to reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia.

TIM PENYUSUN

Compilers

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2024 dan 2025
Financial Statistics of Provincial Government 2024 and 2024
Volume 21, 2025

Pengarah/Director

Pudji Ismartini

Penanggung Jawab/Person in Charge

Harmawanti Marhaeni

Penyunting/Editor

Fadhlullah

Pengolah Data/Data Processors

Disna Haristya Permata
Evita Dyah Wardhani

Penulis Naskah dan Penerjemah/Writers and Translators

Disna Haristya Permata
Izzun Nafiah

Penata Letak/Layouter

Disna Haristya Permata



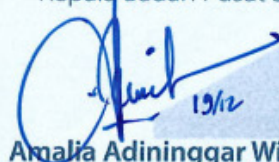
KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data keuangan Pemerintah Provinsi yang disajikan bersumber dari data administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan.

Publikasi ini memuat data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi tahun 2024. Selain data realisasi APBD, publikasi ini juga menyajikan data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan dengan baik. Kami berharap data dan informasi yang tersaji dalam publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan, perencana pembangunan, peneliti, akademisi, mahasiswa, media massa, serta masyarakat luas, baik sebagai bahan referensi maupun sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik



19/12

Amalia Adininggar Widyasanti



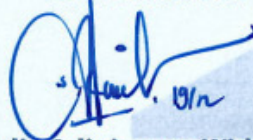
PREFACE

The Financial Statistics of Provincial Government publication is an annual publication that is published by BPS-Statistics Indonesia. The provincial government financial data presented was obtained from administrative data of Directorate of Evaluation and Information Systems, Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance.

This publication presents the realization of provincial government Revenue and Expenditure Budget (APBD realization) data in 2024. In addition, this publication also presents data on the provincial government revenue and expenditure budget for 2025.

We would like to express our deepest appreciation to all parties whose contributions and support have enabled the successful completion and publication of this work. We hope that the data and information presented in this publication will be useful for policymakers, development planners, researchers, academics, students, the media, and the wider public, both as a reference source and as a foundation for the formulation of development policies at the provincial and national levels.

Jakarta, December 2025
Chief Statistician



Amalia Adininggar Widyasanti



Ringkasan Eksekutif

Keterbaruan publikasi terdapat pada metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data mulai 2024 dan seterusnya memanfaatkan data sekunder bersumber dari DJPK, Kementerian Keuangan. Sedangkan metode analisis data yang dilakukan lebih berfokus pada penyajian indikator.

Struktur komponen pendapatan dan belanja pada realisasi APBD 2024 dan APBD 2025 relatif sama. Dari sisi pendapatan, komponen PAD paling dominan. Sumber utama dari PAD berasal dari pajak daerah. Di sisi lain, belanja pemerintah provinsi sebagian besar digunakan untuk belanja operasi. Pada realisasi 2024 pemerintah provinsi mengalami surplus, sedangkan pada anggaran 2025 mengalami defisit.

Indikator keuangan pemerintah provinsi 2024 dari sisi pendapatan secara umum menunjukkan hasil yang positif. Tingkat penyerapan total pendapatan, rasio efektivitas total PAD, dan rasio efektifitas total pajak sudah optimal. Sebagian besar pemerintah provinsi memiliki kategori derajat desentralisasi sangat baik. Akan tetapi, rasio total penerimaan pajak seluruh pemerintah provinsi masih kurang optimal. Selain itu, rasio Kemandirian provinsi di wilayah Indonesia bagian timur masih relatif rendah.

Indikator keuangan pemerintah provinsi 2024 dari sisi belanja secara umum juga menunjukkan hasil yang positif. Belanja operasi menjadi yang paling diprioritaskan. Sementara itu, rasio total belanja fungsi pendidikan paling besar dibandingkan fungsi kesehatan, ekonomi serta perumahan dan fasilitas umum. Menariknya, mulai 2022, rasio total belanja fungsi ekonomi lebih besar dibandingkan fungsi kesehatan.

Potret awal dampak pengelolaan keuangan pemerintah provinsi dapat dilihat melalui hubungan belanja daerah dengan indikator sektor lain. Provinsi dengan belanja daerah dan PDRB kurang dari rata-rata nasional (kuadran III) mendominasi pada 2024. Sedangkan derajat desentralisasi dan persentase penduduk miskin pemerintah provinsi pada 2024 berkorelasi negatif. Sebaliknya, di tahun yang sama, rasio belanja fungsi pendidikan serta kesehatan dan IPM menunjukkan hubungan yang positif.



Executive Summary

The publication's novelty lies in the data collection and analysis methods.

From 2024 onwards, the data collection method will utilize secondary data from the DJPK, Ministry of Finance. Meanwhile, the data analysis method focuses more on the presentation of indicators.

The structure of revenue and expenditure components in realizing the 2024 APBD and the 2025 APBD is relatively the same. In terms of revenue, the PAD component is the most dominant. The primary source of PAD comes from local taxes. On the other hand, provincial government expenditure is mainly used for operational expenditure. In the 2024 fiscal realization, the provincial government registered a surplus, whereas the 2025 budget projects a deficit.

The provincial government's financial indicators for 2024 on the revenue side generally show positive results. The total revenue absorption rate, total PAD effectiveness, and total tax effectiveness ratios are optimal. Most provincial governments have an excellent degree of decentralization. However, the ratio of total tax revenue all provincial government still needs to be more optimal. In addition, the provincial independence ratio in eastern Indonesia is still relatively low.

The provincial government's financial indicators for 2024 from the expenditure side also generally show positive results. Operational expenditure is the most prioritized. Meanwhile, the ratio of total education function expenditure is the largest compared to health, economic, housing, and public facilities functions. Interestingly, starting in 2022, the ratio of total economic function expenditure is more significant than health function expenditure.

The relationship between local Expenditure and indicators of other sectors provides an initial portrait of the impact of provincial government financial management. Provinces with local expenditure and GRDP less than the national average (quadrant III) dominated in 2024. Meanwhile, the degree of decentralization and the percentage of poor people in provincial governments in 2024 are negatively correlated. Conversely, the ratio of education and health function expenditure and the Human Development Index showed a positive relationship in the same year.

Daftar Isi

Contents

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2024 dan 2025
Financial Statistics of Provincial Government 2024 and 2025
Volume 21, 2025

	Halaman/Page
Kata Pengantar	
<i>Preface</i>	v
Ringkasan Eksekutif	
<i>Executive Summary</i>	vii
Daftar Isi	
<i>Contents</i>	ix
Daftar Tabel	
<i>List of Tables</i>	xi
Daftar Gambar	
<i>List of Figures</i>	xiii
Bab 1. Pendahuluan	
<i>Introduction</i>	1
Bab 2. Gambaran Keuangan Pemerintah Provinsi	
<i>Overview of Provincial Government Finance</i>	7
Bab 3. Indikator Keuangan Pemerintah Provinsi	
<i>Indicators of Provincial Government Finance</i>	19
Bab 4. Tabel Keuangan Pemerintah Provinsi	
<i>Tables of Provincial Government Finance</i>	57
Daftar Pustaka	
<i>Bibliography</i>	71
Petunjuk Teknis	
<i>Technical Instructions</i>	73

Daftar Tabel

List of Tables

Tabel/Table	Halaman/Page
1 Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (miliar rupiah), 2024 dan 2025 <i>Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia by Type of Revenue (billion rupiahs), 2024 and 2025</i>	10
2 Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (miliar rupiah), 2024 dan 2025 <i>Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Type of Expenditure (billion rupiahs), 2024 and 2025</i>	14
3 Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Derajat Desentralisasi, 2021–2025 <i>The Distribution of Province in Indonesia by Degree of Decentralization Categories, 2021–2025</i>	29
4 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Revenue Absorption Rate of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	59
5 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Expenditure Absorption Rate of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	60
6 Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Tax Revenue Ratio of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	61
7 Derajat Desentralisasi Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Decentralization Degree of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	62
8 Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Independence Ratio of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	63
9 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	64
10 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Tax Revenue Effectiveness of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	65
11 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Expenditure to Revenue Ratio of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	66
12 Rasio Realisasi Belanja Menurut Jenis Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Expenditure Realization Ratio by Type All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	67
13 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024 <i>Expenditure Ratio by Function of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024</i>	68



Daftar Gambar

List of Figures

Gambar/Figure	Halaman/Page
1 Infografis Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, 2024 <i>Infographics of Financial Statistics of Provincial Government, 2024</i>	8
2 Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (miliar rupiah), 2020–2024 <i>Revenue and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia (billion rupiahs), 2020–2024</i>	22
3 Tingkat Penyerapan Total Pendapatan dan Total Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2020–2024 <i>Level of Total Revenue and Total Expenditure Absorption of Provincial Government Throughout Indonesia (percent), 2020–2024</i>	25
4 Rasio Efektivitas Total PAD Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2019–2023 <i>Total PAD Effectiveness Ratio of Provincial Governments Throughout Indonesia (percent), 2019–2023</i>	27
5 Total Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2020–2024 <i>Total Decentralization Degree and Independence Ratio of Provincial Governments Throughout Indonesia (percent), 2020–2024</i>	31
6 Persebaran Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi, 2024 <i>The Distribution of Provincial Government Independence Rates, 2024</i>	32
7 Rasio Efektivitas Total Pajak dan Rasio Total Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2020–2024 <i>Total Tax Effectiveness Ratio and Total Tax Revenue Ratio of Provincial Governments Throughout Indonesia (percent), 2020–2024</i>	34
8 Rasio Total Belanja terhadap Total Pendapatan dan Rasio Total Belanja Menurut Jenis Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2020–2024 <i>Total Expenditure to Total Revenue Ratio and Total Expenditure Ratio by Type of Provincial Government Throughout Indonesia (percent), 2020–2024</i>	39
9 Rasio Total Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2020–2024 <i>Total Expenditure Ratio by Function of Provincial Government Throughout Indonesia (percent), 2020–2024</i>	42
10 Analisis Kuadran Belanja Pemerintah Provinsi dan PDRB, 2024 <i>Quadrant Analysis of Provincial Government Expenditure and GRDP, 2024</i>	47
11 Scatter-Plot Derajat Desentralisasi dan Persentase Penduduk Miskin, 2024 <i>Scatter-Plot of Decentralization Degree and Percentage of Poor Population, 2024</i>	50
12 Scatter-Plot Belanja Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, dan IPM, 2024 <i>Scatter-Plot of Education Function, Health Function Expenditure and Human Development Index, 2024</i> ..	52

BAB
CHAPTER
1

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

1.1 Penjelasan Umum

Pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk kemajuan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintahan yang handal dan profesional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan isu yang sangat penting terutama yang berkaitan dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Daerah dengan kemandirian yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk melakukan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi dari transfer dana pusat. Daerah juga lebih leluasa melakukan pengembangan jika kemandirian keuangan tercipta.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah.

1.1 General Explanation

Local development is a planned effort for local progress. The ability of a reliable and professional government determines the success of local development. Local development is an integral part of national development, which aims to improve the standard of living and welfare of the people. Development carried out in the regions, both at the provincial and Regency/Municipality levels, must be carried out in an integrated, effective and efficient manner in order to achieve local self-reliance and equitable progress throughout the region.

Financial independence is very important, especially local finance's contribution to local economic growth. Regions with a high independence category level show the ability to carry out development without dependence on central government transfer revenue. Regions will also be more flexible in carrying out development if financial independence is created.

Therefore, the provincial government formulates the Revenue and Expenditure Budget (APBD) Province as a form of local development planning.



Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut. Jadi pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan untuk program pembangunan yang lebih optimal.

1.2 Ruang Lingkup Publikasi

Publikasi statistik keuangan pemerintah provinsi merupakan salah satu bentuk penyajian kompilasi laporan keuangan pemerintah provinsi. Publikasi ini selanjutnya diharapkan dapat menunjukkan transparansi kepada publik serta memotret keterbandingan kinerja keuangan yang dicapai antar provinsi serta menilai tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan anggaran.

APBD recorded the details of programs that will be implemented along with funding sources. Budget preparation was arranged to improve the performance of local government and public services.

Local governments are encouraged to increase their capacity as optimally as possible to fund the independent administration of government and public services. This can be done by exploring all potential sources of funds in the area. So, the local government must try to increase revenue to create a more optimal development program.

1.2 Scope of Publication

Financial statistics of Provincial government are one form of presentation of the compilation of provincial government financial reports. This publication is expected to show transparency to the public, capture the comparability of financial performance achieved between provinces, and assess the level of efficiency and effectiveness of program and budget implementation.



Keterbaruan pada publikasi ini terdapat pada metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data pada publikasi ini mulai tahun 2024 dan seterusnya memanfaatkan data sekunder yaitu data administrasi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan. Data mencakup 38 Provinsi di Indonesia. Data yang ditabulasikan pada publikasi ini berdasarkan posisi laporan realisasi keuangan pemerintah provinsi per 31 Oktober 2025.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penyusunan publikasi ini lebih berfokus pada penyajian indikator dan analisis antar sektor. Hal ini diharapkan agar dapat menghasilkan informasi yang lebih variatif dan menyajikan perspektif yang berbeda namun tetap pada koridor tujuan utama yaitu memotret gambaran kondisi keuangan pemerintah provinsi.

The novelty of this publication is in the data collection and data analysis methods. From 2024 onwards, the data collection method utilizes secondary data, namely administrative data sourced from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance. The data covers 38 provinces in Indonesia. The data tabulated in this publication are based on the provincial government financial realization reports as of October 31, 2025.

The data analysis method used in compiling this publication focuses more on the presentation of indicators and analysis between sectors. This is expected to produce more varied information and present different perspectives, but it still falls short of the main objective, namely, to capture a picture of the provincial government's financial condition.

A circular graphic with a white center containing the chapter title. The circle's border features a blue-tinted image of a modern skyscraper with glass windows.

BAB
CHAPTER
2

**GAMBARAN
KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI**
*OVERVIEW OF
PROVINCIAL GOVERNMENT
FINANCE*

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Financial Statistics of Provincial Government

REALISASI 2024 Realization

Menggunakan data sekunder dari **DJPk Kementerian Keuangan** dan analisisnya fokus pada penyajian indikator

Using secondary data from **DJPk, Ministry of Finance** with the analysis focused on the presentation of indicators

46,48%

Rasio Total Penerimaan Pajak
Total Tax Revenue Ratio

100,46%

Rasio Efektivitas Total Pajak
Total Effectiveness Tax Ratio

100,94%

Rasio Efektivitas PAD
Total PAD Effectiveness Ratio

102,77%

Tingkat Penyerapan Total Pendapatan
Total Revenue Absorption Rate

INDIKATOR PENDAPATAN Revenue Indicators



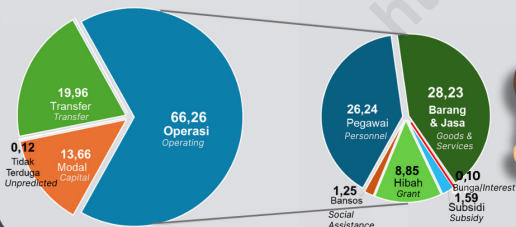
387.663
miliar/billion rupiah

Belanja
Expenditure

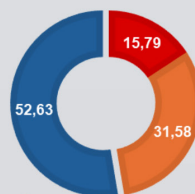
379.807
miliar/billion rupiah

Belanja operasi merupakan komponen paling dominan, dengan belanja barang dan jasa sebagai kontributor terbesar

Operating expenditure is the most dominant component, with spending on goods and services as the largest contributor

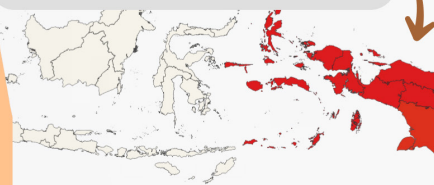


DERAJAT DESENTRALISASI (%) Degree of Decentralization



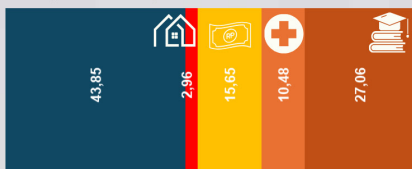
■ Kurang/Less
■ Cukup/Fair
■ Baik/Good

Rasio Kemandirian Provinsi di wilayah Indonesia bagian timur masih relatif rendah
The Provincial Independence Ratio in eastern Indonesia remains relatively low



INDIKATOR BELANJA Expenditure Indicators

Rasio Total Belanja menurut Fungsi (%)
Total Expenditure Ratio by Function (%)



Sumber/Source: DJPK, Kementerian Keuangan (diolah oleh BPS)
DJPK, Ministry of Finance (processed by BPS)

2.1 Struktur Pendapatan Daerah

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Salah satu sumber pembiayaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada 2024 total realisasi pendapatan pemerintah provinsi adalah sebesar 387,66 triliun rupiah. Komponen terbesar dari total realisasi pendapatan pemerintah provinsi ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD terhadap total realisasi pendapatan pemerintah provinsi adalah 54,71 persen atau sebesar 212,09 triliun rupiah. Selain itu, pendapatan transfer juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada total realisasi pendapatan pemerintah provinsi yaitu 44,75 persen atau sebesar 173,49 triliun rupiah. Sedangkan 2,08 triliun rupiah sisanya bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi sebesar 0,54 persen.

PAD menjadi Komponen Paling Dominan pada 2025

Pada tahun 2025, pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 369,48 triliun

2.1 Local Revenue Structure

The Provincial Government has implemented various methods to increase local revenue in an effort to finance its public services. One source of financing is Local Own-Source Revenue (PAD).

Table 1 shows that in 2024, the total realization of provincial government revenue was 387.66 trillion rupiah. The most significant component of the total realization of provincial government revenue is Local Own-Source Revenue (PAD). The contribution of PAD to the total realization of provincial government revenue is 54.71 percent or 212.09 trillion rupiah. In addition, transfer revenue also makes a significant contribution to the total realization of provincial government revenue, namely 44.75 percent or 173.49 trillion rupiah. Meanwhile, the remaining 2.08 trillion rupiah come from other legitimate local revenues with a contribution of 0.54 percent.

PAD as the Most Dominant Component in 2025

In 2025, provincial government revenue is budgeted lower than the previous year, amounting to 369.48 trillion rupiah. This decline is due to adjustments in national

rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian kebijakan fiskal nasional, termasuk langkah efisiensi belanja negara. Selain itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ditargetkan menurun menjadi 194,49 triliun rupiah atau 52,64 persen dari total pendapatan pemerintah provinsi pada tahun 2025.

fiscal policy, including measures to improve spending efficiency. In addition, the contribution of Regional Own-Source Revenue (PAD) is also targeted to decrease to 194.49 trillion rupiah, or 52.64 percent of the total provincial government revenue in 2025.

Tabel 1 Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan
Table (miliar rupiah), 2024 dan 2025
Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia by Type of Revenue(billion
rupiahs), 2024 and 2025

No.	Jenis Pendapatan Type of Revenue	Nilai/Value (miliar/billion rupiah)		Kontribusi/Contribution (persen/percent)	
		Realisasi Realization	Anggaran Budget	Realisasi Realization	Anggaran Budget
		2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah Local Own-Source Revenue	212.094	194.495	54,71	52,64
a.	Pajak Daerah Local Taxes	180.189	161.228	46,48	43,64
b.	Retribusi Daerah Repayments	13.669	14.100	3,53	3,82
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Revenue of Management of Restricted Local Assets	5.557	6.374	1,43	1,73
d.	Lain-lain PAD yang Sah Other Legal Local Own-Source Revenue	12.680	12.792	3,27	3,46
2.	Pendapatan Transfer Transfer Revenue	173.486	171.639	44,75	46,45
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Transfer Revenue of Central Government	172.927	171.231	44,61	46,34
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah Transfer Revenue of Inter-regional	559	409	0,14	0,11
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Other Legal Revenue	2.083	3.349	0,54	0,91
Jumlah/Total		387.663	369.483	100,00	100,00

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS



Selanjutnya, pendapatan transfer menjadi komponen terbesar kedua pada total anggaran pendapatan pemerintah provinsi tahun 2025 yaitu sebesar 46,45 persen atau sebesar 171,64 triliun rupiah. Sedangkan 0,91 persen sisanya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD didominasi dari Penerimaan Pajak Daerah

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Komponen PAD yang memiliki kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan daerah pada 2024 adalah pajak daerah yaitu sebesar 46,48 persen. Sedangkan kontribusi komponen PAD lainnya hanya di bawah 5 persen. Namun, adanya penyesuaian kebijakan fiskal seperti efisiensi anggaran belanja negara, pemerintah menurunkan target kontribusi PAD menjadi 52,64 persen pada APBD 2025. Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi pajak daerah juga ditargetkan menurun menjadi 43,64 persen. Namun, beberapa komponen PAD lainnya justru ditargetkan meningkat yaitu retribusi daerah sebesar 3,82 persen, hasil pengelolaan kekayaan

Furthermore, transfer revenue is the second most significant component of the total provincial government revenue budget in 2025, which is 46.45 percent or 171.64 trillion rupiahs. At the same time, the remaining 0.91 percent comes from other legal revenue.

Local Tax Revenue Dominates PAD

PAD is one of the essential sources of revenue for regions. Regions that have succeeded in significantly increasing their PAD indicate that they have utilized existing potential optimally.

The PAD component that contributed the most to regional revenue realization in 2024 was regional taxes, amounting to 46.48 percent. Meanwhile, the contributions of the other PAD components were each below 5 percent. However, along with fiscal policy adjustments—including efficiency measures in national spending—the government reduced the PAD contribution target in the 2025 regional budget (APBD) to 52.64 percent. In line with this adjustment, the contribution of regional taxes is also targeted to decline to 43.64 percent. Nevertheless, several other PAD components are targeted to increase, namely retributions at 3.82 percent, proceeds from regional asset management at 1.73



daerah sebesar 1,73 persen, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 3,46 persen.

Banten masih menjadi provinsi dengan nilai proporsi PAD tertinggi pada realisasi 2024 yaitu sebesar 72,76 persen. Sedangkan, Provinsi Riau adalah provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang memiliki nilai proporsi PAD tertinggi pada realisasi 2024 yaitu sebesar 57,18 persen.

Komponen Terbesar Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat

Sementara itu, pada 2024 realisasi pendapatan transfer didominasi oleh pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dengan kontribusi sebesar 44,61 persen. Sedangkan 0,14 persen sisanya berasal dari pendapatan transfer antar daerah. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan pemerintah provinsi terhadap bantuan dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Pada data anggaran pendapatan pemerintah provinsi 2025, kontribusi dari pendapatan transfer ditargetkan meningkat sebesar 1,70 persen menjadi 46,45 persen dibandingkan realisasi 2024. Pendapatan transfer ini masih didominasi oleh pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dengan kontribusi sebesar 46,34 persen. Sedangkan 0,11 persen sisanya berasal dari pendapatan transfer antar daerah.

percent, and other legal local own-source revenue at 3.46 percent.

Banten is still the province with the highest PAD proportion value in the 2024 realization, 72.76 percent. Meanwhile, Riau Province is a province outside Java-Bali Island that has the highest PAD proportion value in the 2024 realization, 57.18 percent.

The Largest Component of Transfer Revenue Comes from the Central Government

Meanwhile, in 2024, the realization of transfer revenue was dominated by transfer revenue from the central government, with a contribution of 44.61 percent. Meanwhile, the remaining 0.14 percent came from inter-local transfer revenue. This indicates that the provincial government's dependence on assistance from the central government is still relatively high.

In the 2025 provincial government revenue budget data, the contribution of transfer revenues is targeted to increase by 1.70 percent to 46.45 percent compared to the 2024 realization. These transfer revenues continue to be dominated by transfers from the central government, contributing 46.34 percent, while the remaining 0.11 percent comes from interregional transfers.

2.2 Struktur Belanja Daerah

Komponen Terbesar Pada Belanja Daerah adalah Belanja Operasi

Struktur belanja pemerintah provinsi 2024-2025 disajikan pada Tabel 2. Secara umum struktur belanja pemerintah provinsi baik realisasi 2024 maupun anggaran 2025 tidak banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun nilai dari komponen belanja cukup berbeda, akan tetapi belanja operasi masih tetap menjadi komponen dengan kontribusi paling besar. Sebaliknya, komponen belanja tidak terduga memiliki nilai dan kontribusi yang paling kecil terhadap total belanja pemerintah provinsi pada realisasi 2024 dan anggaran 2025.

Realisasi belanja operasi pada 2024 adalah sebesar 251,66 triliun rupiah. Kontribusi belanja operasi ini terhadap total realisasi belanja pemerintah provinsi adalah sebesar 66,26 persen. Selanjutnya, belanja operasi dianggarkan sebesar 259,52 triliun rupiah pada 2025 dengan peningkatan kontribusi sebesar 2,30 persen dibandingkan realisasi 2024. Komponen belanja operasi yang paling dominan adalah belanja barang dan jasa

2.2 Local Expenditure Structure

The Largest Component of Local Expenditure is Operational Expenditure

The provincial government expenditure structure for 2024-2025 is presented in Table 2. In general, the expenditure structure of provincial governments, both in the 2024 realization and the 2025 budget, remains largely unchanged compared to the previous year. Although the value of the expenditure components is quite different, operational expenditure remains the component with the most significant contribution. On the other hand, the unexpected expenditure component has the smallest value and contribution to the total provincial government expenditure in the 2024 realization and the 2025 budget.

The realization of operational expenditures in 2024 was 251.66 trillion rupiahs. This operational expenditure contributed 66.26 percent to the total realization of provincial government expenditures. Furthermore, operational expenditure is budgeted at 259.52 trillion rupiahs in 2025, with an increase in the contribution of 2.30 percent compared to the realization in 2024. The most dominant component of operational expenditure is

dilanjutkan dengan belanja pegawai, baik pada realisasi belanja 2024. Namun, pada APBD 2025 belanja pegawai dianggarkan lebih tinggi daripada belanja barang dan jasa.

goods and services expenditure, followed by personnel expenditure. However, in the 2025 regional budget (APBD), personnel expenditure is allocated at a higher amount than goods and services expenditure.

Tabel 2 **Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (miliar rupiah), 2024 dan 2025**
Table **Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Type of Expenditure (billion rupiahs), 2024 and 2025**

No.	Jenis Belanja Type of Expenditure	Nilai/Value (milliar/billion rupiah)		Kontribusi/Contribution (persen/percent)	
		Realisasi Realization	Anggaran Budget	Realisasi Realization	Anggaran Budget
		2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BELANJA OPERASI OPERATING EXPENDITURE	251.665	259.516	66,26	68,56
a.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	99.653	114.454	26,24	30,24
b.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	107.210	113.697	28,23	30,04
c.	Belanja Bunga Interest Expenditure	375	308	0,10	0,08
d.	Belanja Subsidi Subsidy Expenditure	6.041	6.382	1,59	1,69
e.	Belanja Hibah Grant Expenditure	33.624	20.546	8,85	5,43
f.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	4.761	4.129	1,25	1,09
2.	BELANJA MODAL CAPITAL EXPENDITURE	51.882	53.819	13,66	14,22
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA UNPREDICTED EXPENDITURE	442	6.104	0,12	1,61
4.	BELANJA TRANSFER TRANSFER EXPENDITURE	75.818	59.070	19,96	15,61
a.	Belanja Bagi Hasil Revenue Sharing Expenditure	59.313	44.509	15,62	11,76
b.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	16.505	14.561	4,35	3,85
Jumlah/Total		379.806	378.509	100,00	100,00

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS



Kontribusi belanja barang dan jasa terhadap total belanja pemerintah provinsi yaitu 28,23 persen atau sebesar 107,21 triliun rupiah pada realisasi 2024 dan senilai 30,04 persen atau 113,70 triliun rupiah pada anggaran 2025. Komponen belanja operasi yang memiliki kontribusi terbesar kedua pada periode 2024-2025 adalah belanja pegawai. Nilai realisasi belanja pegawai pada 2024 adalah sebesar 99,65 triliun rupiah dengan kontribusi terhadap total belanja daerah sebesar 26,24 persen. Kontribusi belanja pegawai ini dianggarkan meningkat menjadi sebesar 30,24 persen pada 2025 atau 114,45 triliun rupiah.

Sementara itu, komponen belanja hibah memberikan kontribusi terhadap total belanja pemerintah provinsi sebesar 8,85 persen atau senilai 33,62 triliun rupiah pada realisasi 2024. Nilai belanja hibah ini dianggarkan senilai 20,55 triliun rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 5,43 persen terhadap total anggaran belanja pemerintah provinsi 2025.

Selanjutnya, belanja subsidi memberikan kontribusi terhadap total belanja pemerintah provinsi sebesar 1,59 persen pada realisasi 2024 dan sebesar 1,69 persen pada anggaran 2025. Nilai belanja bantuan sosial dan belanja bunga masing-masing sebesar 4,76 triliun rupiah dan 0,37 triliun rupiah pada realisasi 2024. Sedangkan pada 2025 belanja bantuan

The contribution of goods and services expenditure to the total provincial government expenditure is 28.23 percent or 107.21 trillion rupiahs in the realization in 2024 and 30.04 percent or 113.70 trillion rupiahs in the 2025 budget. The operational expenditure component that has the second most significant contribution in the 2024-2025 period is personnel expenditure. The realization value of personnel expenditure in 2024 is 99.65 trillion rupiahs, with a contribution to the total local expenditure of 26.24 percent. The contribution of personnel expenditure is budgeted to increase to 30.24 percent in 2025 or 114.45 trillion rupiahs.

Meanwhile, the grant expenditure component contributed 8.85 percent, or 33.62 trillion rupiahs, to the total provincial government expenditure in 2024. The value of this grant expenditure is budgeted at 20.55 trillion rupiahs, or 5.43 percent, to the total provincial government expenditure budget in 2025.

Furthermore, subsidy expenditure contributed 1.59 percent to total provincial government expenditure in 2024 and 1.69 percent in the 2025 budget. The value of social assistance expenditure and interest expenditure was 4.76 trillion rupiahs and 0.40 trillion rupiahs, respectively, in 2024. Meanwhile, in 2025, social assistance expenditure and interest expenditure were



sosial dan belanja bunga dianggarkan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 1,09 persen dan 0,08 persen terhadap total belanja daerah.

Belanja Transfer Sebagai Komponen Terbesar Kedua

Belanja transfer merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap total belanja pemerintah provinsi baik pada realisasi 2024 maupun anggaran 2025. Nilai kontribusi belanja transfer ini pada 2024 adalah sebesar 19,96 persen. Sedangkan pada 2025, kontribusi belanja transfer dianggarkan menurun 4,35 persen dibandingkan realisasi 2024 atau senilai 59,07 triliun rupiah. Komponen belanja transfer yang paling dominan berkontribusi terhadap total belanja pemerintah provinsi adalah belanja bagi hasil yaitu sebesar 15,62 persen pada realisasi 2024 dan dianggarkan berkontribusi sebesar 11,76 persen pada 2025.

Selanjutnya, kontribusi belanja modal pada realisasi 2024 adalah sebesar 13,66 persen terhadap total belanja pemerintah provinsi atau senilai 51,88 triliun rupiah. Pada 2025, belanja modal dianggarkan meningkat menjadi senilai 53,82 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 14,22 persen terhadap total belanja daerah. Sementara itu, pada realisasi 2024

budgeted to contribute 1.09 percent and 0.08 percent, respectively, to total local expenditure.

Transfer Expenditure as the Second Largest Component

Transfer expenditure is the second largest contributor to total provincial government expenditure in both the 2024 realization and the 2025 budget. The contribution value of this transfer expenditure in 2024 is 19.96 percent. Meanwhile, in 2025, the contribution of transfer expenditure is budgeted to decrease by 4.35 percent compared to the 2024 realization, amounting to 59.07 trillion rupiahs. The transfer expenditure component that most dominantly contributes to total provincial government expenditure is revenue sharing expenditure, which is 15.62 percent in the 2024 realization and is budgeted to contribute 11.76 percent in 2025.

Furthermore, the contribution of capital expenditure in the 2024 realization was 13.66 percent of the total provincial government expenditure or 51.88 trillion rupiahs. In 2025, capital expenditure was budgeted at 56.75 trillion rupiahs or contributed 14.22 percent to the total local expenditure. Meanwhile, in the 2024 realization, the contribution of unexpected expenditure to the total local



kontribusi belanja tidak terduga terhadap total belanja daerah adalah sebesar 0,12 persen atau senilai 0,44 triliun rupiah. Sedangkan pada 2025, belanja tidak terduga ini dianggarkan senilai 6,10 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 1,61 persen terhadap total belanja daerah.

Realisasi 2024 Mengalami Surplus

Berdasarkan nilai Tabel 1 terhadap nilai Tabel 2, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi pada 2024 mengalami surplus, di mana realisasi pendapatan tahun 2024 lebih besar daripada belanja. Kondisi ini juga dapat dijelaskan melalui nilai rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah pada realisasi 2024 yaitu sebesar 97,97 persen. Nilai rasio yang berada di bawah 100 persen ini mengartikan bahwa belanja yang dilakukan oleh pemerintah provinsi tidak melebihi pendapatan yang dihasilkan. Namun demikian, pada anggaran 2025 diperkirakan akan terjadi defisit anggaran dengan nilai rasio sebesar 102,44 persen.

Pada tahun 2024, keuangan pemerintah provinsi mencatat kondisi surplus dengan nilai pendapatan sebesar 387,66 triliun rupiah dan belanja sebesar 379,81 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah melebihi pengeluaran, menandakan adanya pengelolaan fiskal yang relatif efisien dan sehat. Surplus ini

expenditure was 0.12 percent or 0.44 trillion rupiahs. Meanwhile, in 2025, this unexpected expenditure was budgeted at 6.10 trillion rupiahs or contributed 1.61 percent to the total local expenditure.

The 2024 Realization Shows a Surplus

Based on the comparison between Table 1 and Table 2, the provincial government's revenue and expenditure realization in 2024 recorded a surplus, as revenue exceeded expenditure. This condition is also reflected in the regional expenditure-to-revenue ratio for the 2024 realization, which stood at 97.97 percent. A ratio below 100 percent indicates that provincial expenditure did not exceed the revenue earned. However, the 2025 budget is projected to experience a deficit, as indicated by the expenditure-to-revenue ratio of 102.44 percent.

In 2024, the provincial government's finances recorded a surplus, with total revenue of 386.32 trillion rupiah and expenditure of 379.81 trillion rupiah. This indicates that regional revenue exceeded expenditure, demonstrating relatively efficient and sound fiscal management. The surplus also reflects the provincial government's ability



mencerminkan kemampuan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber pendapatan serta mengendalikan belanja daerah secara efektif.

to optimize revenue sources and effectively control regional spending.

<https://www.bps.go.id>

A circular graphic with a white center containing the chapter title. The circle's border features a blue-tinted image of a modern skyscraper. A faint watermark 'bps.go.id' is visible across the circle.

BAB
CHAPTER
3

**INDIKATOR
KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI**
*INDICATORS OF
PROVINCIAL GOVERNMENT
FINANCE*

Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tertinggi Terjadi Pada 2021

Tren realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi selama lima tahun terakhir disajikan pada Gambar 2. Hasilnya menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pemerintah provinsi berfluktuatif selama periode 2020-2024. Pada 2021, realisasi pendapatan pemerintah provinsi mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 7,50 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 2020. Hal ini merupakan gambaran dari kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan positif juga terjadi pada realisasi pendapatan 2024 yaitu sebesar 6,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebaliknya, pertumbuhan negatif terjadi pada 2020 dan 2022 masing-masing sebesar 6,56 persen dan 1,89 persen. Pertumbuhan negatif pada 2020 merupakan dampak dari Covid-19. Sedangkan pada 2022, pertumbuhan negatif ini salah satunya terjadi karena adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang pada tahun sebelumnya dimaksimalkan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui berbagai program bantuan sosial yang tidak lagi dilaksanakan pada 2022.

Realisasi belanja pemerintah provinsi pada Gambar 2 secara umum

The Highest Growth in Revenue Realization Occurred in 2021

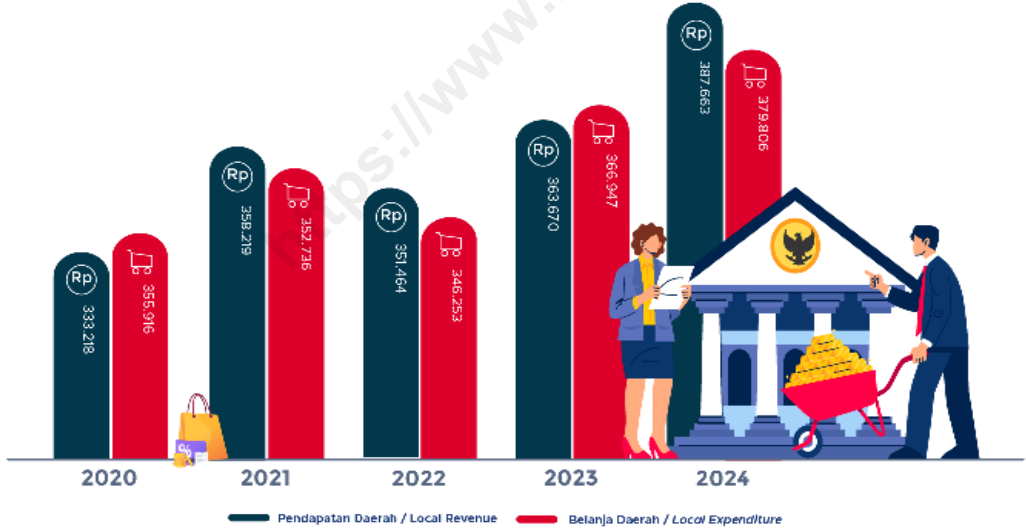
The trend of provincial government revenue and expenditure realization over the past five years is presented in Figure 2. The results show that the provincial government revenue realization fluctuated during the 2020-2024 period. In 2021, provincial government revenue realization experienced the highest growth, namely 7.50 percent, compared to revenue realization in 2020. This is a reflection of the recovery conditions after the Covid-19 pandemic. Positive growth also occurred in revenue realization in 2024, namely 6.60 percent compared to the previous year.

Conversely, negative growth occurred in 2020 and 2022, respectively, amounting to 6.56 percent and 1.89 percent. The negative growth in 2020 was the impact of COVID-19. Meanwhile, in 2022, this negative growth occurred partly due to a decrease in transfer revenue from the central government, which in the previous year was maximized for post-COVID-19 pandemic recovery through various social assistance programs that were no longer implemented in 2022.

The realization of provincial government expenditure in Figure 2 generally has a similar

memiliki pola yang serupa dengan tren realisasi pendapatan. Realisasi belanja pemerintah provinsi pada 2023 mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode 2020-2024 yaitu sebesar 5,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memotret adanya upaya pemerintah provinsi yang lebih tinggi dalam hal penguatan desentralisasi fiskal untuk memperkuat otonomi dan kapasitas fiskal pemerintah daerah dibawahnya. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk lebih membantu pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mencapai target pembangunan lokal.

pattern to the trend in revenue realization. The realization of provincial government expenditure in 2023 experienced the highest growth during the 2020-2024 period, which was 5.98 percent compared to the previous year. This condition reflects the provincial government's efforts to strengthen fiscal decentralization to strengthen the autonomy and fiscal capacity of the local governments below it. In addition, this is also intended to further assist local governments in managing budgets and achieving local development targets.



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 2 Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (miliar rupiah), 2020–2024
Figure Revenue and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia (billion rupiah), 2020–2024

Meskipun pada tahun 2022 realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi mengalami penurunan, pada tahun 2023 keduanya kembali menunjukkan tren meningkat. Pendapatan tumbuh sebesar 3,47 persen, sementara belanja meningkat lebih tinggi, yaitu 5,98 persen. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan pemerintah provinsi kembali menguat dengan pertumbuhan sebesar 6,60 persen, sedangkan realisasi belanja tumbuh sebesar 3,50 persen. Kondisi ini menggambarkan arah pengelolaan fiskal yang lebih berhati-hati, di mana peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti oleh ekspansi belanja yang besar, sehingga mencerminkan efisiensi serta penataan prioritas belanja yang lebih optimal.

3.1 Penyerapan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi

Sebagian Besar Pemerintah Provinsi 2024 Menyerap Anggaran Pendapatan di Atas 100%

Penyerapan pendapatan merupakan gambaran keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan. Tingkat penyerapan total pendapatan seluruh pemerintah provinsi pada Gambar 3 menunjukkan nilai yang berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir.

Although in 2022 the provincial government's revenue and expenditure realizations experienced a decline, both returned to an upward trend in 2023. Revenue grew by 3.47 percent, while expenditure increased at a higher rate of 5.98 percent. In 2024, provincial government revenue strengthened again with growth of 6.60 percent, while expenditure grew by 3.50 percent. This condition reflects a more cautious fiscal management approach, in which increases in revenue are not always followed by large spending expansions, thereby indicating improved efficiency and a more optimal prioritization of government expenditures.

3.1 Provincial Government Revenue and Expenditure Absorption

The Total Revenue Absorption Rate of All Provincial Governments in 2024 is more than 100 percent

Revenue absorption reflects the government's success in realizing budgeted revenue. The total revenue absorption rate of all provincial governments in Figure 3 shows fluctuating values in the last 5 years.



Pada 2024, tingkat penyerapan total pendapatan seluruh pemerintah provinsi adalah sebesar 102,77 persen. Artinya, sebagian besar total pendapatan seluruh pemerintah provinsi berhasil melebihi total nilai pendapatan yang dianggarkan pada APBD 2024 karena memiliki tingkat penyerapan di atas 100 persen.

Provinsi dengan tingkat penyerapan pendapatan tertinggi pada 2024 secara berurutan adalah provinsi Bali (123,14 Persen), Kalimantan Selatan (118,82 persen), dan Jawa Timur (112,93 persen). Sebaliknya, provinsi Lampung (89,33 persen), Sumatera Utara (90,45 persen), dan Sulawesi Utara (93,56 persen) masing-masing merupakan provinsi dengan tingkat penyerapan pendapatan terendah pada 2024.

Belanja Pemerintah Provinsi 2024 Didominasi Penyerapan di Atas 95%

Tingkat penyerapan belanja pemerintah provinsi pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang umumnya baik. Secara nasional, total penyerapan belanja pemerintah provinsi mencapai 97,13 persen, menandakan kemampuan daerah dalam merealisasikan sebagian besar anggaran yang telah direncanakan.

In 2024, the overall revenue absorption rate of all provincial governments reached 102.77 percent. This means that most provincial governments succeeded in exceeding their total budgeted revenues in the 2024 regional budget (APBD), as their revenue absorption levels were above 100 percent.

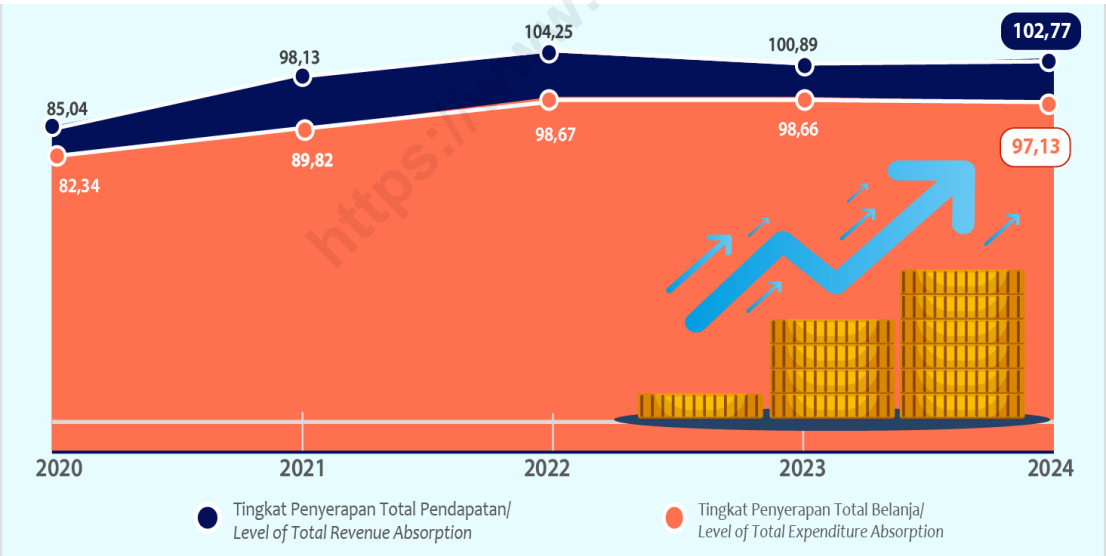
The provinces with the highest revenue absorption rates in 2024 in sequence were Bali (123.14 percent), Kalimantan Selatan (118.82 percent), and Jawa Timur (112.93 percent). In contrast, the provinces of Lampung (89.33 percent), Sumatera Utara (90.45 percent), and Sulawesi Utara (93.56 percent) are each provinces with the lowest revenue absorption rates in 2024.

Provincial Government Expenditure in 2024 Is Dominated by Absorption Rates Above 95%

The expenditure absorption rate of provincial governments in 2024 indicates generally strong performance. Nationally, total provincial government expenditure absorption reached 97.13 percent, reflecting the regions' ability to realize most of their planned budgets.

Mayoritas provinsi mencatat penyerapan lebih dari 95 persen, mencerminkan pelaksanaan program yang relatif efektif. Bahkan, sejumlah provinsi menunjukkan penyerapan di atas 100 persen, seperti Sumatera Selatan (103,87%), Jawa Timur (103,90%), Bali (105,44%), Nusa Tenggara Barat (106,81%), Kalimantan Tengah (103,81%), Kalimantan Utara (101,95%), Sulawesi Utara (102,53%), Gorontalo (100,55%), Sulawesi Barat (100,17%), dan Papua Barat Daya (104,87%). Penyerapan di atas 100 persen umumnya menunjukkan adanya penyesuaian anggaran atau percepatan pelaksanaan kegiatan.

The majority of provinces recorded absorption rates above 95 percent, indicating relatively effective program implementation. Several provinces even showed absorption rates exceeding 100 percent, such as South Sumatra (103.87%), East Java (103.90%), Bali (105.44%), West Nusa Tenggara (106.81%), Central Kalimantan (103.81%), North Kalimantan (101.95%), North Sulawesi (102.53%), Gorontalo (100.55%), West Sulawesi (100.17%), and Southwest Papua (104.87%). Absorption rates above 100 percent generally indicate budget adjustments or accelerated implementation of activities.



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 3 Tingkat Penyerapan Total Pendapatan dan Total Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2020–2024

Figure

Level of Total Revenue and Total Expenditure Absorption of Provincial Government Throughout Indonesia (percent), 2020–2024



Meski demikian, terdapat beberapa provinsi dengan penyerapan di bawah 90 persen, seperti Riau (86,99%), Kepulauan Bangka Belitung (82,99%), dan Papua Tengah (77,29%). Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam proses perencanaan atau pelaksanaan anggaran di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah provinsi mampu mengelola belanja dengan efektif, meskipun beberapa wilayah masih perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi anggarannya pada tahun-tahun mendatang.

3.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD memotret keberhasilan pemerintah provinsi dalam menggali potensi riil daerahnya masing-masing. Rasio ini dilihat melalui besaran realisasi PAD yang didapatkan terhadap target PAD yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Rasio Efektivitas Total PAD Pemerintah Provinsi menunjukkan tren positif periode 2020-2024

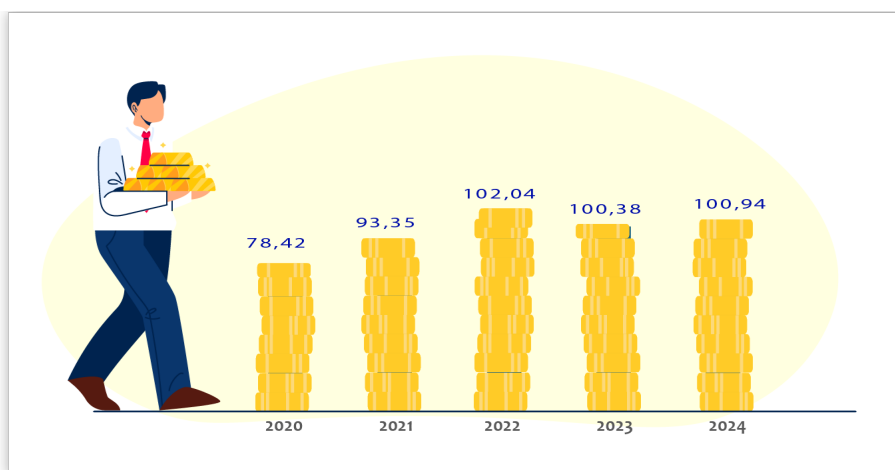
However, some provinces recorded absorption rates below 90 percent, including Riau (86.99%), Bangka Belitung Islands (82.99%), and Central Papua (77.29%). This suggests potential challenges in planning or executing budgets in those regions.

Overall, these results show that most provincial governments were able to manage their expenditures effectively, although several regions still need to improve the quality of their planning and budget execution in the coming years.

3.2 PAD Effectiveness Ratio

The PAD effectiveness ratio captures provincial governments' success in exploring the real potential of their respective regions. This ratio is seen through the amount of PAD realization obtained against the PAD target set. A region's ability to carry out its duties is categorized as effective if the ratio achieved is at least 100 percent. The higher effectiveness ratio, the better the region's ability.

The Total Effectiveness Ratio of the Provincial Government's PAD shows a positive trend for 2020-2024.



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 4 Rasio Efektivitas Total PAD Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2019–2024
Figure Total PAD Effectiveness Ratio of Provincial Governments Throughout Indonesia (percent), 2020–2024

Gambar 4 menunjukkan rasio efektivitas total PAD seluruh pemerintah provinsi di Indonesia periode 2020-2024. Secara umum, rasio efektivitas total PAD pemerintah provinsi menunjukkan tren yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Tren menurun paling tajam hanya terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pada 2024, rasio efektivitas total PAD seluruh pemerintah provinsi adalah sebesar 100,94 persen. Artinya, secara umum, pemerintah provinsi sudah cukup optimal dan efektif dalam menggali potensi riil daerahnya. Hal ini ditunjukkan melalui nilai rasio lebih dari 100 persen.

Berdasarkan nilai rasio efektivitas PAD pada 2024, cukup berimbang antara

Figure 4 shows the total PAD effectiveness ratio of all provincial governments in Indonesia for the 2020-2024 period. In general, provincial governments' total PAD effectiveness ratio has shown a fluctuating trend in the last 5 years. The sharpest downward trend only occurred in 2020 due to the Covid-19 pandemic.

In 2024, all provincial governments' total PAD effectiveness ratio was 100.94 percent. This means that, in general, provincial governments have been quite optimal and effective in exploring the real potential of their regions, as indicated by a ratio value of more than 100 percent.

The PAD effectiveness ratio value in 2024 is quite balanced between provinces that are



provinsi yang sudah optimal dan masih perlu ditingkatkan. Sebanyak 55,26 persen atau 21 provinsi yang sudah memiliki nilai rasio efektivitas PAD di atas 100 persen. Sedangkan 17 provinsi sisanya masih harus terus berusaha mengoptimalkan potensi riil daerahnya agar mencapai target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Provinsi Papua Barat Daya (195, 09 Persen), Papua Selatan (136,68 persen), dan Bali (135,86 persen) secara berurutan menjadi provinsi dengan rasio efektivitas PAD tertinggi pada 2024. Sebaliknya, tiga provinsi dengan rasio efektivitas PAD terendah secara berurutan adalah provinsi Papua Barat (76,09 persen), Lampung (81,82 persen), dan Nusa Tenggara Timur (81,84 persen).

3.3 Derajat Desentralisasi

PAD juga dapat menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Indikator kemandirian pemerintah provinsi dapat dilihat melalui besaran derajat desentralisasi dan rasio kemandirian pemerintah provinsi.

already optimal and those that still need to be improved. As many as 55.26 percent, or 21 provinces, already have a PAD effectiveness ratio value above 100 percent. Meanwhile, the remaining 17 provinces must continue to strive to optimize their regions' real potential in order to achieve the previously set PAD target.

Papua Barat Daya Province (533.86 percent), Papua (136.68 percent), and Bali (135.86 percent) have the highest PAD effectiveness ratios in 2024. On the other hand, the three provinces with the lowest PAD effectiveness ratios are Papua Barat (76.09 percent), Lampung (81.82 percent), and Nusa Tenggara Timur (81.84 percent).

3.3 Degree of Decentralization

PAD can also be an essential indicator of local financial independence. The more significant the role of PAD in the APBD, the role of the central government, in this case, the transfer of funds to the regions, is getting smaller. Indicators of provincial government independence can be seen through the degree of decentralization and the ratio of provincial government independence.

Derajat Desentralisasi Provinsi di Indonesia Mayoritas Masuk Kategori Sangat Baik Pada 2024

Derajat desentralisasi pemerintah provinsi pada Gambar 5 dapat dilihat melalui perbandingan antara realisasi PAD terhadap total pendapatan pemerintah provinsi (Mahmudi, 2019). Menurut Halim dalam Maryanti (2023), derajat desentralisasi dapat dikategorikan menjadi 6 (enam) kategori yaitu sangat kurang (0-10%), kurang (10,01%-20%), cukup (20,01-30%), sedang (30,01%-40%), baik (40,01%-50%) dan sangat baik (>50%).

Kategori tersebut mengindikasikan bahwa ketika persentase pendapatan

The Decentralization Degree of Provinces In Indonesia is Mainly Categorized as Very Good in 2024

The decentralization degree of provincial governments in Figure 5 can be seen through the comparison between PAD realization and total provincial government revenue (Mahmudi, 2019). According to Halim in Maryanti (2023), the degree of decentralization can be categorized into 6 (six) categories, namely very less (0-10%), less (10.01%-20%), fair (20.01-30%), medium (30.01%-40%), good (40.01%-50%) and very good (>50%).

These categories indicate that when the percentage of local revenue to total local

Tabel 3 Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Derajat Desentralisasi, 2021–2025
Table The Distribution of Province in Indonesia by Degree of Decentralization Categories, 2021–2025

Derajat Desentralisasi Degree of Decentralization Categories	Realisasi/Realization				Anggaran Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sangat Kurang (0-10 %) Very Less	5	5	3	2	3
Kurang (>10-20 %) Less	4	0	2	4	3
Cukup (>20-30%) Fair	4	7	6	6	4
Sedang (>30-40%) Medium	12	6	7	6	8
Baik (>40-50%) Good	5	7	7	8	10
Sangat Baik (>50%) Very Good	8	13	13	12	10
Jumlah/Total	38	38	38	38	38

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS



asli daerah terhadap total pendapatan daerah semakin tinggi, maka sangat baik kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sebaliknya, apabila persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah kecil, maka kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat kurang.

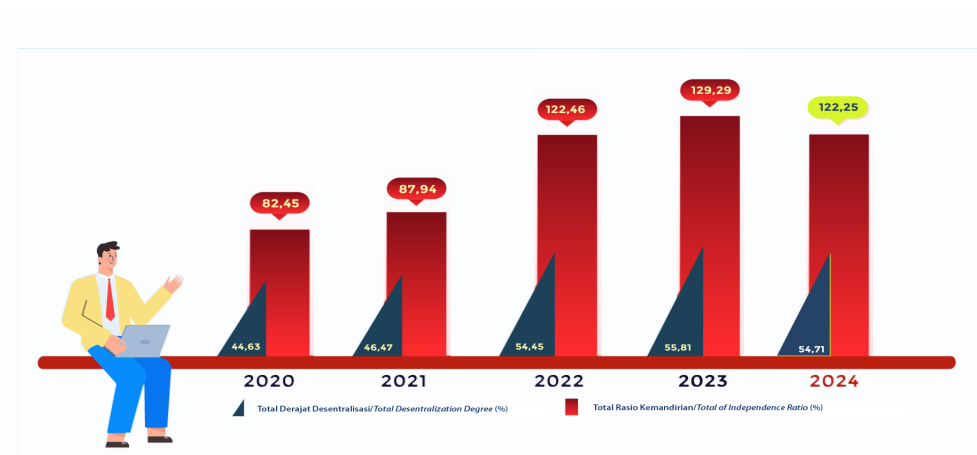
Distribusi provinsi di Indonesia menurut derajat desentralisasi selama periode 2021-2025 disajikan pada Tabel 3. Secara umum, derajat desentralisasi mayoritas provinsi di Indonesia sudah dalam kategori cukup hingga sangat baik. Pada periode 2023-2024, ada dua provinsi yang masuk ke dalam kategori sangat kurang. Adanya pemekaran pada wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat menyebabkan jumlah provinsi yang masuk dalam kategori derajat desentralisasi sangat kurang pada periode 2023-2024, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Provinsi Papua Pegunungan.

Selanjutnya, Gambar 5 juga menunjukkan adanya fluktuasi pada nilai total derajat desentralisasi seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Pada 2024, nilai total derajat desentralisasi seluruh pemerintah provinsi adalah sebesar 54,71 persen. Artinya, secara umum, pemerintah provinsi masih belum optimal dalam penyelenggaraan

revenue is higher, the ability of the local government to implement decentralization is excellent. Conversely, if the percentage of local revenue to total local revenue is small, then the ability of the region to implement local autonomy could be much better.

The distribution of provinces in Indonesia according to the degree of decentralization during the 2021-2025 period is presented in Table 3. In general, the degree of decentralization of the majority of provinces in Indonesia is fair to be very good. In the 2023-2024, there are two provinces fell into the very less category. The expansion of the Papua and Papua Barat Provinces has caused the number of provinces in the category of very less decentralization in the 2023-2024 period are Papua Barat Daya Province and Papua Pegunungan Province.

Furthermore, Figure 5 also shows fluctuations in the total degree of decentralization of all provincial governments in Indonesia over the past five years. In 2024, the total degree of decentralization of all provincial governments was 54.71 percent. This means that provincial governments are still not optimal in implementing decentralization.



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 5 Total Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2020–2024
Figure Total Decentralization Degree and Independence Ratio of Provincial Governments Throughout Indonesia (percent), 2020–2024

desentralisasi.

Berdasarkan nilai derajat desentralisasi pada 2024, Banten menjadi provinsi dengan derajat desentralisasi tertinggi pada 2024 yaitu sebesar 72,76 persen. Sebaliknya, derajat desentralisasi terendah tercatat berada di provinsi Papua Pegunungan dengan nilai derajat desentralisasi 7,77 persen pada 2024. Sementara itu, provinsi Riau dan Sumatera Utara menjadi provinsi dengan derajat desentralisasi tertinggi di luar Pulau Jawa-Bali masing-masing sebesar 57,18 persen dan 55,67 persen pada 2024.

Based on the value of the degree of decentralization in 2024, Banten became the province with the highest degree of decentralization in 2024, namely 72.76 percent. Conversely, the lowest degree of decentralization was recorded in the province of Papua Pegunungan, with a degree of decentralization of 7.77 percent in 2024. Meanwhile, Riau and Sumatera Utara provinces became the provinces with the highest degree of decentralization outside Java-Bali, respectively, at 57.18 percent and 55.67 percent in 2024.

3.4 Rasio Kemandirian

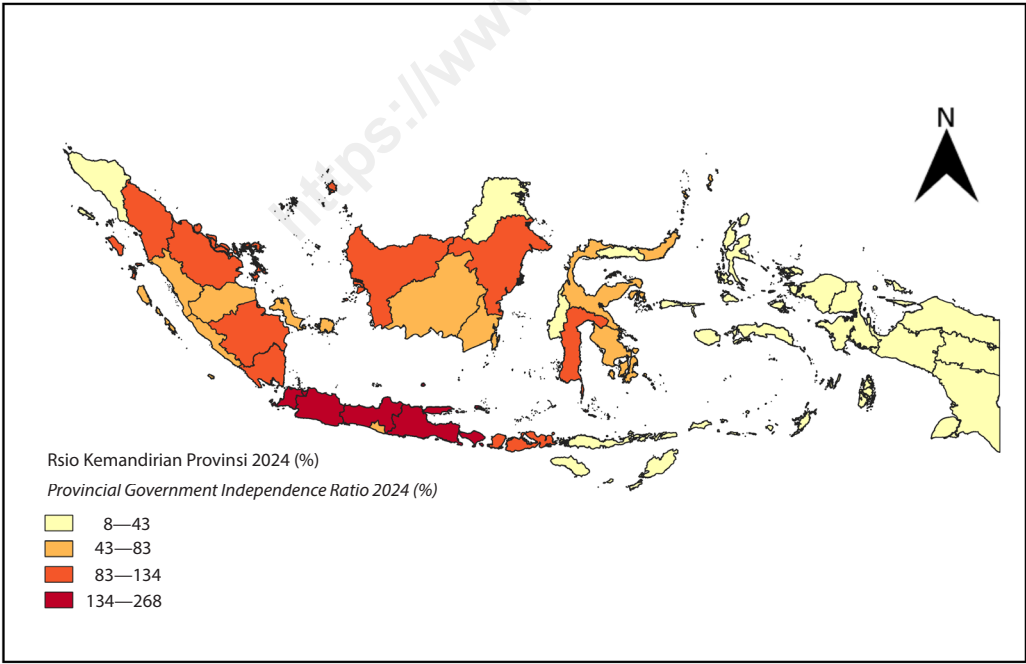
Indikator lain yang juga dapat memotret kemampuan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah rasio kemandirian pemerintah provinsi. Indikator ini dihitung melalui perbandingan antara realisasi PAD terhadap total pendapatan transfer ditambah dengan pinjaman daerah (Mahmudi, 2019).

Tren total rasio kemandirian seluruh pemerintah provinsi di Indonesia periode 2020-2024 disajikan pada Gambar 5. Hasilnya menunjukkan adanya tren positif pada nilai total rasio kemandirian

3.4 Independence Ratio

Another indicator that can also capture the provincial government's ability to organize government is the provincial government's independence ratio. This indicator is calculated by comparing PAD realization to total transfer revenue plus local loans (Mahmudi, 2019).

Figure 5 presents the total trend of all provincial government independence ratios in Indonesia for the 2020-2024 period. The results show a positive trend in the total value of the independence ratio of all provincial



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 6 Persebaran Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi, 2024
Figure *The Distribution of Provincial Government Independence Ratio, 2024*

seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Pada 2024, total rasio kemandirian seluruh pemerintah provinsi adalah sebesar 122,25 persen. Artinya, secara umum, tingkat kemandirian pemerintah provinsi sudah cukup optimal. Hal ini ditunjukkan melalui nilai rasio lebih dari 100 persen.

Berdasarkan nilai rasio kemandirian pada 2024, provinsi dengan rasio kemandirian kurang optimal mendominasi yaitu sebanyak 26 provinsi atau 68,42 persen. Sedangkan 31,58 persen sisanya merupakan provinsi dengan rasio kemandirian lebih dari 100 persen.

Rasio Kemandirian Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur Relatif Rendah

Distribusi rasio kemandirian pemerintah provinsi 2024 disajikan pada Gambar 6. Pengelompokan wilayah pada peta menggunakan metode *natural breaks*. Secara umum, provinsi di wilayah Indonesia bagian timur memiliki rasio kemandirian daerah yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi di wilayah Indonesia bagian barat. Aceh menjadi provinsi di wilayah Indonesia bagian barat dengan rasio kemandirian terendah yaitu 39,49 persen.

Sejalan dengan derajat desentralisasi, Banten menjadi provinsi dengan rasio

governments in Indonesia over the past 5 years. In 2024, the total independence ratio of all provincial governments was 122.25 percent. This means that, in general, the level of provincial government independence is quite optimal, as indicated by a ratio value of more than 100 percent.

Based on the independence ratio value 2024, 26 provinces, or 68.42 percent, have less-than-optimal independence ratios, while the remaining 31.58 percent are provinces with an independence ratio of more than 100 percent.

The Independence Ratio of Provincial in Eastern Indonesia is Relatively Low

Figure 6 presents the distribution of the provincial government independence ratio in 2024. The map's region grouping uses the natural breaks method. In general, provinces in eastern Indonesia have a local independence ratio that is still relatively low compared to provinces in western Indonesia. Aceh is the province in western Indonesia with the lowest independence ratio, namely 39.49 percent.

In line with the degree of decentralization, Banten became the province with the highest

kemandirian tertinggi pada 2024 yaitu sebesar 267,58 persen. Sebaliknya, rasio kemandirian terendah tercatat berada di provinsi Papua pegunungan dengan nilai rasio kemandirian 8,43 persen pada 2024. Sementara itu, provinsi Riau dan Sumatera Utara menjadi provinsi dengan rasio kemandirian tertinggi di luar Pulau Jawa-Bali masing-masing sebesar 133,84 persen dan 127,60 persen pada 2024.

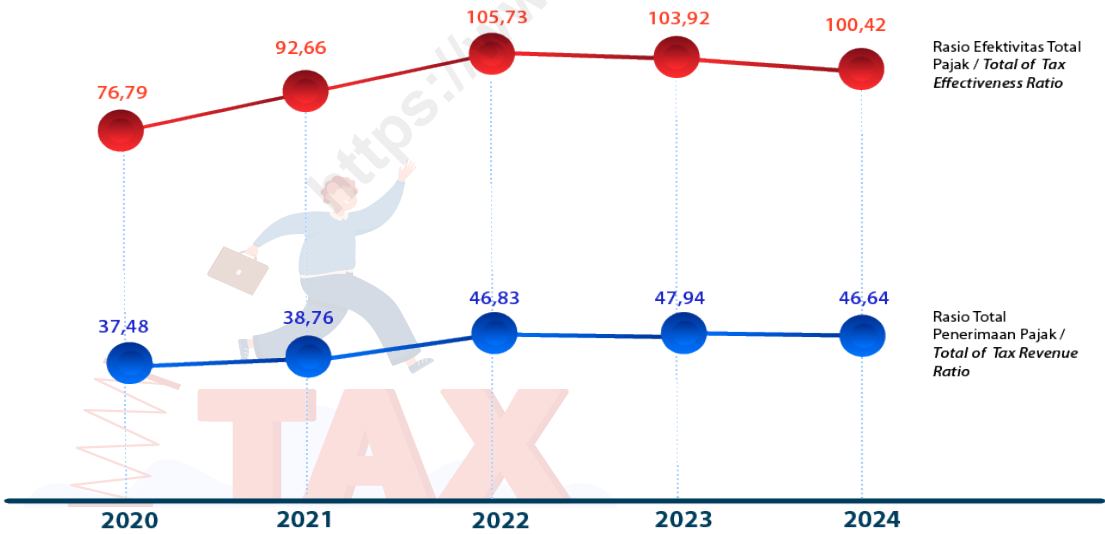
3.5 Rasio Efektivitas Pajak

Rasio efektivitas pajak memotret keberhasilan pemerintah provinsi dalam mengumpulkan pajak daerahnya masing-masing. Rasio ini dilihat melalui besaran realisasi pajak yang didapatkan

independence ratio in 2024, namely 267.58 percent. On the other hand, the lowest independence ratio was recorded in the province of Papua Pegunungan with an independence ratio value of 8.43 percent in 2024. Meanwhile, Riau and Sumatera Utara provinces became the provinces with the highest independence ratios outside Java-Bali, at 133.84 percent and 127.60 percent in 2024, respectively.

3.5 Tax Effectiveness Ratio

The tax effectiveness ratio reflects the success of provincial governments in collecting their respective local taxes. This ratio is seen through the amount of tax realization obtained against the set tax



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 7 Rasio Efektivitas Total Pajak dan Rasio Total Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2020–2024
Figure Total Tax Effectiveness Ratio and Total Tax Revenue Ratio of Provincial Governments Throughout Indonesia (percent), 2020–2024

terhadap target penerimaan pajak yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Rasio Efektivitas Total Pajak Menunjukkan Tren Positif Periode 2020-2024

Gambar 7 menunjukkan tren rasio efektivitas total pajak seluruh pemerintah provinsi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Pada 2024, rasio efektivitas total pajak seluruh pemerintah provinsi adalah sebesar 100,42 persen. Artinya, secara umum, pemerintah provinsi sudah cukup optimal dan efektif dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini ditunjukkan melalui nilai rasio lebih dari 100 persen. Berdasarkan nilai rasio efektivitas pajak pada 2024, provinsi yang sudah optimal yaitu sebanyak 52,63 persen atau 20 provinsi.

Provinsi Selatan (194,06 Persen), Papua Barat Daya (151,46 persen), dan Bali (139,55 persen) secara berurutan menjadi provinsi dengan rasio efektivitas pajak tertinggi pada 2024. Sebaliknya, tiga provinsi dengan rasio efektivitas pajak terendah secara berurutan adalah provinsi Papua

revenue target. A region's ability to carry out its duties is categorized as effective if the ratio achieved is at least 100%. The higher the effectiveness ratio, the better the region's ability.

Total Tax Effectiveness Ratio shows a positive trend for the period 2020-2024

Figure 7 shows Indonesia's total trend of all provincial government tax effectiveness ratios in the last five years. In 2024, all provincial governments' total tax effectiveness ratio was 100.42 percent. This means that provincial governments have been optimal and effective in collecting local taxes according to the target, as indicated by a ratio value of more than 100 percent. Based on the tax effectiveness ratio value in 2024, optimal provinces, namely 52.63 percent or 20 provinces.

The provinces of Papua Selatan (151.46 percent), Papua Barat Daya (139.55 percent), and Bali (139.55 percent) are sequentially the provinces with the highest tax effectiveness ratios in 2024. Conversely, the three provinces with the lowest tax effectiveness ratios are the provinces of Papua Barat (69.04 percent),

Barat (69,04 persen), Papua (79,00 persen), dan Sumatera Utara (82,11 persen).

3.6 Rasio Penerimaan Pajak

Rasio Total Penerimaan Pajak 2024 masih relatif rendah

Indikator lain yang dapat mengukur kinerja pajak pemerintah provinsi adalah dengan menghitung rasio penerimaan pajak. Pada 2024, rasio total penerimaan pajak seluruh pemerintah provinsi adalah sebesar 46,48 persen. Artinya, secara umum, pemerintah provinsi masih harus berupaya lebih kuat untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak dalam pendapatan daerahnya.

Banten (68,95 persen) menjadi provinsi dengan rasio penerimaan pajak tertinggi pada 2024. Sebaliknya, provinsi dengan rasio penerimaan pajak terendah tercatat di provinsi Papua Barat (6,06 persen). Sumatera Utara menjadi provinsi di luar Pulau Jawa-Bali dengan rasio penerimaan pajak tertinggi yaitu 49,99 persen pada 2024. Sebaliknya, Aceh menjadi provinsi di luar Pulau Papua dengan rasio penerimaan pajak terendah yaitu 16,94 persen.

3.7 Rasio Belanja terhadap Pendapatan

Salah satu indikator yang juga

Papua (79.00 percent), and Sumatera Utara (82.11 percent).

3.6 Tax Revenue Ratio

Total Tax Revenue Ratio 2024 is still relatively low

Another indicator that can measure the tax performance of provincial governments is by calculating the tax revenue ratio. In 2024, all provincial governments' total tax revenue ratio was 46.48 percent. This means that provincial governments still need to make stronger efforts to maximize tax revenue in their local revenue.

Banten (68.95 percent) became the province with the highest tax revenue ratio in 2024. On the other hand, the province with the lowest tax revenue ratio was recorded in Papua Barat (6.06 percent). Sumatera Utara became the province outside Java-Bali, with the highest tax revenue ratio, 49.99 percent, in 2024. On the other hand, Aceh became the province outside Papua with the lowest tax revenue ratio, 16.94 percent.

3.7 Ratio of Expenditure to Revenue

One indicator that can also be used

bisa digunakan untuk melihat efisiensi keuangan daerah adalah rasio belanja terhadap pendapatan. Rasio dengan nilai moderat (mendekati 100 persen) menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Hal ini sekaligus menandakan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi yang sehat. Provinsi dengan rasio yang sehat tentu akan lebih mampu menyesuaikan belanja sesuai dengan kapasitas pendapatannya sehingga mengurangi resiko defisit anggaran.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sudah Sesuai dengan Kapasitas Pendapatan Pada 2024

Berdasarkan Gambar 8, rasio total belanja terhadap total pendapatan menunjukkan tren yang relatif positif selama periode 2020-2024. Rasio total belanja terhadap total pendapatan seluruh pemerintah provinsi pada 2024 adalah sebesar 97,97 persen. Artinya, secara umum, pengelolaan keuangan pemerintah provinsi sudah cukup sehat dan seimbang/moderat serta sudah sesuai dengan kapasitas pendapatan.

Sumatera Selatan (99,48 persen), Jambi (99,46 persen), dan Aceh (99,04 persen) secara berturut-turut merupakan provinsi dengan nilai rasio belanja terhadap pendapatan paling sehat dan moderat

to see local financial efficiency is the ratio of expenditure to revenue. A ratio with a moderate value (approaching 100 percent) indicates a balance between revenue and expenditure. This also indicates healthy provincial government financial management. Provinces with a healthy ratio will undoubtedly be better able to adjust expenditure according to their revenue capacity, reducing the risk of a budget deficit.

Provincial Government Financial Management is in Accordance with Revenue Capacity in 2024

Based on Figure 8, the ratio of total expenditure to the total revenue shows a relatively positive trend during 2020-2024. All provincial governments' ratio of total expenditure to the total revenue in 2024 was 97.97 percent. This means that provincial government financial management is relatively healthy and balanced/moderate and is by revenue capacity.

Sumatera Selatan (99.48 percent), Jambi (99.46 percent), and Aceh (99.04 percent) are, respectively, the provinces with the healthiest and most moderate expenditure-to-revenue ratios or approaching 100 percent. On



atau mendekati 100 persen. Sebaliknya, provinsi dengan pengelolaan keuangan daerah yang kurang sehat karena memiliki nilai rasio paling jauh melebihi 100 persen sehingga berpotensi mengalami defisit anggaran pada 2024 adalah Papua (110,45 persen), Kalimantan Tengah (109,55 persen), dan Papua Barat (105,20 persen). Dilihat dari sisi lain, provinsi dengan pengelolaan keuangan daerah yang kurang sehat karena memiliki nilai rasio paling jauh dari 100 persen adalah Papua Tengah (88,57 persen), Kalimantan Selatan (89,79 persen), dan Kalimantan Timur (92,66 persen). Hal ini berpotensi tidak terserapnya anggaran pada 2024 yang menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program yang kurang maksimal serta inefisiensi dalam manajemen keuangan daerah.

3.8 Rasio Realisasi Belanja Menurut Jenis

Berdasarkan tren nilai rasio total realisasi belanja menurut jenis pada Gambar 8, terlihat bahwa pemerintah provinsi secara umum masih lebih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja modal. Rasio total belanja operasi seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selalu mendominasi selama 2021-2024. Tingginya rasio belanja operasi ini disebabkan oleh tingginya pengeluaran

the other hand, provinces with unhealthy local financial management because they have ratio values that are farthest from 100 percent and, therefore, have the potential to experience a budget deficit in 2024 are Papua (110.45 percent), Kalimantan Tengah (109.55 percent), and Papua Barat (105.20 percent). On the other hand, provinces with unhealthy local financial management because they have ratio values that are farthest from 100 percent are Papua Tengah (88.57 percent), Kalimantan Selatan (89.79 percent), and Kalimantan Timur (92.66 percent). This has the potential for the budget not to be absorbed in 2024, indicating less than optimal program planning and implementation and inefficiency in local financial management.

3.8 Ratio of Expenditure Realization by Type

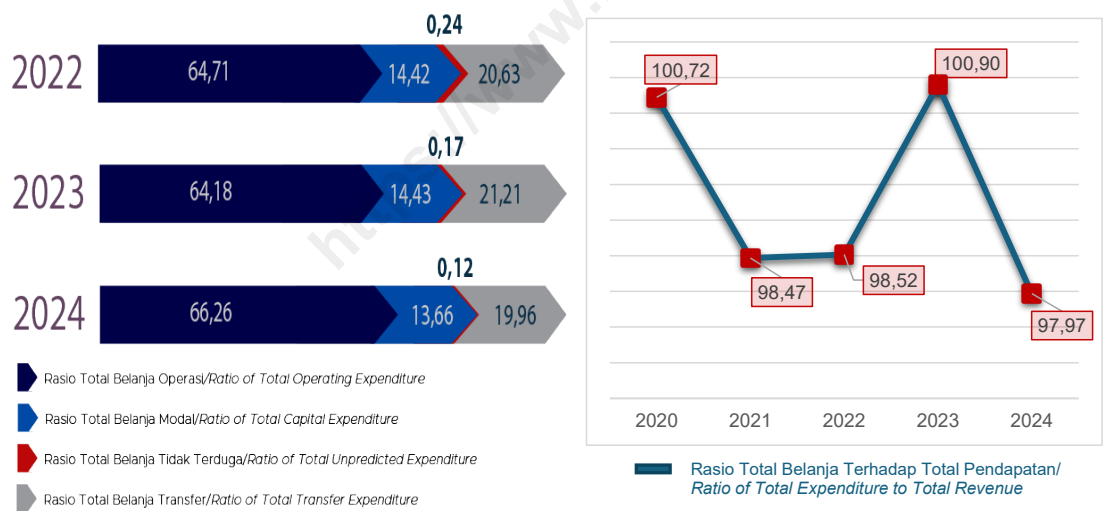
Based on the total expenditure realization ratio by type trend in Figure 8, provincial governments generally still prioritize operating expenditures over capital expenditures. The total operating expenditure ratio of all provincial governments in Indonesia has always dominated during 2021-2024. The high operating expenditure ratio is due to the high expenditure used for personnel expenditures allocated for salaries

yang digunakan untuk belanja pegawai yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan PNS. Selain belanja pegawai, terdapat belanja barang dan jasa yang juga hampir setara dengan belanja pegawai.

Provinsi dengan rasio belanja operasi tertinggi pada 2024 secara berturut-turut adalah DKI Jakarta (83,73 persen), Papua (83,26 persen), dan Gorontalo (78,46 persen). Sebaliknya, provinsi Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Sumatera Selatan memiliki rasio belanja operasi terendah pada 2024 yaitu masing-masing sebesar 48,67 persen, 48,16 persen dan 45,63 persen

and allowances and additional revenue for civil servants. In addition to personnel expenditures, there are expenditures on goods and services, almost equivalent to personnel expenditures.

The provinces with the highest operating expenditure ratios in 2024 were DKI Jakarta (83.73 percent), Papua (83.73 percent), and Gorontalo (78.46 percent). In contrast, the provinces of Kalimantan Timur, Papua Barat, and Sumatera Selatan had the lowest operating expenditure ratios in 2024, namely 48.67 percent, 48.16 percent, and 45.63 percent, respectively.



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 8 Rasio Total Belanja terhadap Total Pendapatan dan Rasio Total Belanja Menurut Jenis Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2022–2024
Figure Total Expenditure to Total Revenue Ratio and Total Expenditure Ratio by Type of Provincial Government Throughout Indonesia (percent), 2022–2024



Komponen terbesar kedua dalam struktur belanja pemerintah provinsi adalah belanja transfer. Rasio total belanja transfer selama tahun 2021-2023 menunjukkan tren yang positif, namun sedikit menunjukkan penurunan di tahun 2024. Semakin tingginya rasio belanja transfer utamanya disebabkan oleh semakin tingginya pengeluaran yang digunakan untuk bantuan keuangan.

Provinsi dengan rasio belanja transfer tertinggi pada 2024 secara berturut-turut adalah Sumatera Selatan (39,39 persen), Jawa Barat (37,83 persen), dan Papua Barat (36,40 persen). Sebaliknya, provinsi DKI Jakarta, Papua Pegunungan, dan Papua memiliki rasio belanja transfer terendah pada 2024 yaitu masing-masing sebesar 0,55 persen, 5,97 persen, dan 6,45 persen.

Rasio Belanja Modal Pada Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur Lebih Besar Dibandingkan Bagian Barat

Berbeda dengan belanja operasi dan belanja transfer, rasio total belanja modal seluruh pemerintah provinsi masih lebih rendah namun menunjukkan tren yang terus meningkat dan sedikit menurun di tahun 2024. Menariknya, sebagian besar rasio belanja modal pada wilayah Indonesia bagian tengah dan timur lebih besar dibandingkan bagian barat.

Transfer expenditure is the second largest component of the provincial government expenditure structure. The ratio of total transfer expenditures from 2021 to 2023 shows a positive trend, but it slightly decreased in 2024. The increasing transfer expenditure ratio is mainly due to the increasing expenditures on financial assistance.

The provinces with the highest transfer expenditure ratios in 2024 were Sumatera Selatan (39.39 percent), Jawa Barat (37.83 percent), and Papua Barat (36.40 percent). In contrast, the provinces of DKI Jakarta, Papua Pegunungan, and Papua had the lowest transfer expenditure ratios in 2024, namely 0.55 percent, 5.97 percent, and 6.45 percent, respectively.

The Capital Expenditure Ratio in Central and Eastern Indonesia is Larger than in the Western Region

In contrast to operating and transfer expenditure, all provincial governments' total capital expenditure ratio is still lower but showing an increasing trend and slightly decreased in 2024. Interestingly, the capital expenditure ratio in Indonesia's central and eastern parts is more significant than in the western.

Pada 2024, rasio total belanja modal seluruh pemerintah provinsi adalah sebesar 13,66 persen. Provinsi dengan rasio belanja modal tertinggi pada 2024 secara berturut-turut adalah Kalimantan Tengah (32,38 persen), Papua Barat Daya (31,60 persen), dan Kalimantan Selatan (26,66 persen). Sebaliknya, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki rasio belanja modal terendah pada 2024 yaitu masing-masing sebesar 5,95 persen, 6,37 persen, dan 6,68 persen.

Belanja tidak terduga pemerintah provinsi di Indonesia selalu menjadi kontributor terkecil selama periode 2021-2024 dengan nilai yang berfluktuatif. Provinsi dengan rasio belanja tidak terduga tertinggi pada 2024 secara berturut-turut adalah Papua Pegunungan (2,45 persen), Papua Selatan (2,36 persen), dan Papua Tengah (0,60 persen). Sebaliknya, sebanyak 15 provinsi memiliki rasio belanja tidak terduga terendah pada 2024 yaitu mendekati 0 persen.

3.9 Rasio Belanja Fungsi

Rasio belanja menurut fungsi merupakan salah satu indikator yang penting untuk menggambarkan komitmen, arah prioritas kebijakan dan strategi Pembangunan pemerintah provinsi.

In 2024, all provincial governments' total capital expenditure ratio was 13.66 percent. The provinces with the highest capital expenditure ratios in 2024 were Kalimantan Tengah (32.38 percent), Papua Barat Daya (31.60 percent), and Kalimantan Selatan (26.66 percent). In contrast, the provinces of Jawa Barat, Jawa Tengah, and Jawa Timur had the lowest capital expenditure ratios in 2024, namely 5.95 percent, 6.37 percent, and 6.68 percent, respectively.

Provincial governments' unpredicted expenditures in Indonesia were minor contributors during the 2021-2024 period, with fluctuating values. The provinces with the highest unpredicted expenditure ratios in 2024 were Papua Pegunungan (2.45 percent), Papua Selatan (2.36 percent), and Papua Tengah (0.60 percent). In contrast, 15 provinces had the lowest unpredicted expenditure ratios in 2024, which was close to 0 percent.

3.9 Functional Expenditure Ratio

The expenditure ratio by function is an important indicator of the commitment and priority direction of provincial government policies and development strategies.

Pemerintah Provinsi Prioritaskan Belanja untuk Pendidikan

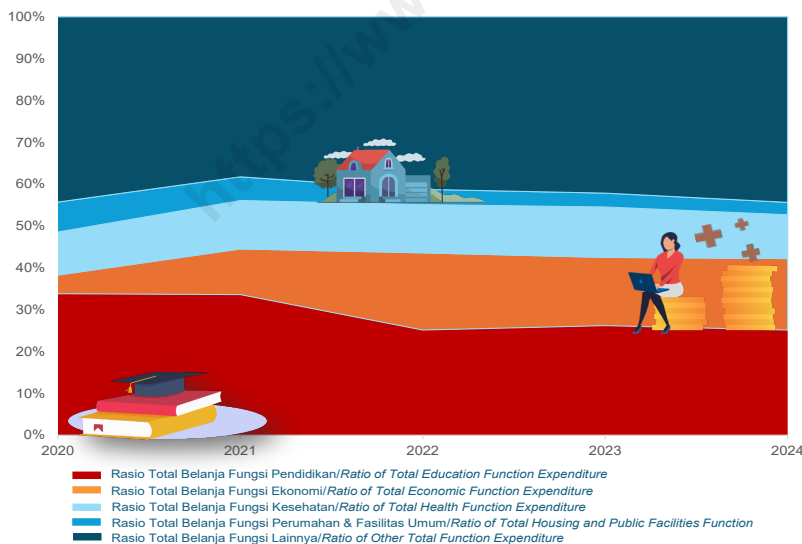
Provincial Government Prioritizes Expenditure on Education

Berdasarkan Gambar 9, meskipun memiliki tren menurun, kontribusi rasio total belanja fungsi Pendidikan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia adalah yang paling dominan jika dibandingkan fungsi Kesehatan, ekonomi, maupun perumahan dan fasilitas umum selama 2020-2024.

Nilai rasio total belanja fungsi pendidikan selalu di atas 20 persen, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa daerah harus mengalokasikan APBD minimal 20 persen untuk memenuhi kebutuhan

Based on Figure 9, although it has a downward trend, the contribution of the total Education function expenditure ratio of all provincial governments in Indonesia is the most dominant compared to the Health, economic, housing, and public facilities functions during 2020-2024.

The value of the total Education function expenditure ratio is consistently above 20 percent. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 31, paragraph 4 states that regions must allocate a minimum of 20 percent of the APBD to meet



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 9 Rasio Total Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (persen), 2020–2024
Figure Total Expenditure Ratio by Function of Provincial Government Throughout Indonesia (percent), 2020–2024

penyelenggaraan Pendidikan nasional. Pada 2024, masih terdapat 23,68 persen (9 provinsi) yang memiliki rasio belanja fungsi Pendidikan kurang dari 20 persen. Menariknya, Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang mengalokasikan belanja untuk fungsi Pendidikan tertinggi pada tahun 2024, yaitu sebesar 43,82 persen.

Rasio Belanja Fungsi Kesehatan Menunjukkan Penurunan di tahun 2024

Berbeda dengan belanja fungsi Pendidikan, rasio total belanja fungsi Kesehatan—sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9—justru memperlihatkan tren peningkatan selama empat tahun berturut-turut, sebelum kemudian menurun pada tahun 2024. Meskipun ketentuan mengenai batas minimum belanja kesehatan telah dihapus, rasio total belanja fungsi Kesehatan pemerintah provinsi di Indonesia pada periode 2020–2024 tetap berada di kisaran 10 persen.”

Pada 2024, rasio total belanja fungsi kesehatan pemerintah provinsi di Indonesia adalah 10,48 persen. Menariknya, di Indonesia masih didominasi oleh provinsi dengan rasio belanja fungsi Kesehatan dibawah rata-rata yaitu sebanyak 55,26 persen atau sebanyak 21 provinsi.

Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan rasio belanja fungsi Kesehatan

the needs of organizing national education. In 2024, 23.68 percent (9 provinces) still had an Education function expenditure ratio of less than 20 percent. Interestingly, Nusa Tenggara Timur became the province that allocated the largest share of expenditure to the education function in 2024, amounting to 43.82 percent.”

Health Function Expenditure Ratio Decreased in 2024

In contrast to expenditure on the Education function, the ratio of total expenditure on the Health function—as shown in Figure 9—exhibited an upward trend for four consecutive years before declining in 2024. Although the requirement for a minimum allocation for health spending has been removed, the ratio of total expenditure on the Health function among provincial governments in Indonesia during the 2020–2024 period remained around 10 percent.

In 2024, the total ratio of all provincial government health function expenditure in Indonesia is 10.48 percent. Interestingly, Indonesia is still dominated by provinces with a health function expenditure ratio below the average, namely 55.26 percent or 21 provinces.

Nusa Tenggara Barat became the province with the highest ratio of Health



tertinggi pada tahun 2024, yakni sebesar 18,29 persen. Sebaliknya, rasio terendah tercatat di Jawa Tengah dengan nilai 2,96 persen. Selain Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Barat juga menunjukkan rasio belanja fungsi Kesehatan yang relatif kecil, masing-masing sebesar 4,19 persen dan 5,51 persen. Perbedaan rasio ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain prioritas kebijakan daerah, struktur pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, program pembangunan yang sedang berlangsung, serta besaran total belanja daerah yang sangat beragam

Rasio Belanja Fungsi Ekonomi Lebih Besar Dibandingkan Fungsi Kesehatan Mulai 2022

Berdasarkan Gambar 9, rasio total belanja fungsi ekonomi berfluktuatif selama lima tahun terakhir. Menariknya, Gambar 9 juga menunjukkan adanya perubahan arah prioritas kebijakan pemerintah provinsi mulai tahun 2022. Hal ini terlihat melalui pergeseran besaran nilai rasio total belanja fungsi ekonomi yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai rasio total belanja fungsi kesehatan.

Belanja fungsi ekonomi merupakan belanja yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk bidang perhubungan,

Function Expenditure in 2024, amounting to 18.29 percent. Conversely, the lowest ratio was recorded in Jawa Tengah at 2.96 percent. In addition to Jawa Tengah, the provinces of DI Yogyakarta and Jawa Barat also showed relatively low ratios of Health Function Expenditure, at 4.19 percent and 5.51 percent respectively. These differences in ratios may be influenced by several factors, including regional policy priorities, the division of authority between provincial and district/municipal governments, ongoing development programs, and the wide variation in total regional expenditures.

Economic Function Expenditure Ratio is Larger than Health Function Starting in 2022

Figure 9 shows that the ratio of total economic function expenditure has fluctuated over the past five years. Interestingly, Figure 9 also shows a change in the direction of provincial government policy priorities starting in 2021. This can be seen through the shift in the value of the total economic function expenditure ratio, which is greater than the value of the total health function expenditure ratio.

Provincial governments use economic function expenditure for transportation, labor, investment, agriculture, forestry,



tenaga kerja, penanaman modal, pertanian, kehutanan, koperasi dan umkm, ketahanan pangan, transmigrasi, serta kelautan dan perikanan.

Pada 2024, rasio total belanja fungsi ekonomi seluruh pemerintah provinsi di Indonesia adalah 15,65 persen. Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat Daya merupakan provinsi dengan nilai rasio belanja fungsi ekonomi tertinggi pada 2024 masing-masing sebesar 38,38 persen, 36,97 persen dan 33,11 persen. Ketiga provinsi ini, merupakan provinsi yang memiliki rasio belanja fungsi kesehatan cukup rendah pada 2024. Dengan kata lain, arah prioritas kebijakan ketiga pemerintah provinsi ini adalah penguatan sisi ekonomi dibandingkan kesehatan. Sebaliknya, rasio belanja ekonomi terendah pada 2024 tercatat pada provinsi Jawa Tengah (4,14 persen), Jawa Barat (7,68 persen), dan DI Yogyakarta (8,80 persen).

Rasio Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Menunjukkan Tren yang Terus Menurun Pada 2020-2024

Belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum diharapkan dapat memotret pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Berdasarkan Gambar 9, rasio total belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum menunjukkan tren yang terus menurun selama lima tahun terakhir.

cooperatives and MSMEs, food security, transmigration, maritime affairs, and fisheries.

In 2024, the total economic function expenditure ratio of all provincial governments in Indonesia will be 15.65 percent. Papua Selatan, Kalimantan Tengah and Papua Barat Daya are the provinces with the highest economic function expenditure ratio in 2024 at 38.38 percent, 36.97 percent, and 33.11 percent, respectively. These three provinces have a reasonably low health function expenditure ratio in 2024. In other words, the priority direction of the policies of these three provincial governments is strengthening the economic side compared to health. In contrast, the lowest economic expenditure ratio in 2024 was recorded in the provinces of Jawa Tengah (4.14 percent), Jawa Barat (7.68 percent), and DI Yogyakarta (8.80 percent).

Housing and Public Facilities Function Expenditure Ratio Shows a Continuous Declining Trend in 2020-2024

Housing and public facilities expenditure is expected to capture infrastructure development in each region. Based on Figure 9, the ratio of total expenditure on housing and public facilities shows a continuous downward trend over the past five years.



Pada 2024, rasio total belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum seluruh pemerintah provinsi di Indonesia adalah 2,96 persen. Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Riau merupakan provinsi dengan nilai rasio belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum tertinggi pada 2024 masing-masing sebesar 9,19 persen, 7,21 persen, dan 7,14 persen. Sebaliknya, rasio belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum terendah pada 2024 tercatat pada provinsi Jawa Tengah (0,52 persen), Nusa Tenggara Timur (0,89 persen), dan Bali (1,21 persen).

3.10 Hubungan Belanja Daerah dan PDRB

Salah satu indikator lain yang cukup penting untuk dilihat adalah bagaimana hubungan antara belanja daerah dan PDRB yang dihasilkan suatu pemerintah provinsi. Gambaran hubungan kedua variabel ini penting sebagai potret awal untuk menunjukkan produktivitas sekaligus efektivitas belanja pemerintah provinsi pada tahun 2024.

Belanja pemerintah daerah idealnya menjadi salah satu bagian dalam penyusunan (input) nilai PDRB suatu daerah. Sehingga produktivitas belanja dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan

In 2024, the average housing and public facilities expenditure ratio of provincial governments in Indonesia is 2.96 percent. Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, and Riau are the provinces with the highest housing and public facilities expenditure ratio in 2024 at 9.19 percent, 7.21 percent, and 7.14 percent, respectively. Conversely, the lowest housing and public facilities expenditure ratio in 2024 was recorded in the provinces of Jawa Tengah (0.52 percent), Nusa Tenggara Timur (0.89 percent), and Bali (1.21 percent).

3.10 Relationship between Local Expenditure and GRDP

Another important indicator to examine is the relationship between local expenditure and GRDP generated by a provincial government. Determining this relationship is important as an initial portrait of the productivity and effectiveness of provincial government expenditure in 2024.

Local government expenditure should ideally be one part of the preparation (input) of a region's GRDP value. Expenditure productivity can be interpreted as the level of local expenditure ability to increase the GRDP

belanja daerah dalam meningkatkan PDRB yang dihasilkan pemerintah provinsi. Hubungan kedua variabel tersebut dapat dilihat melalui analisis kuadran yang disajikan pada Gambar 10.

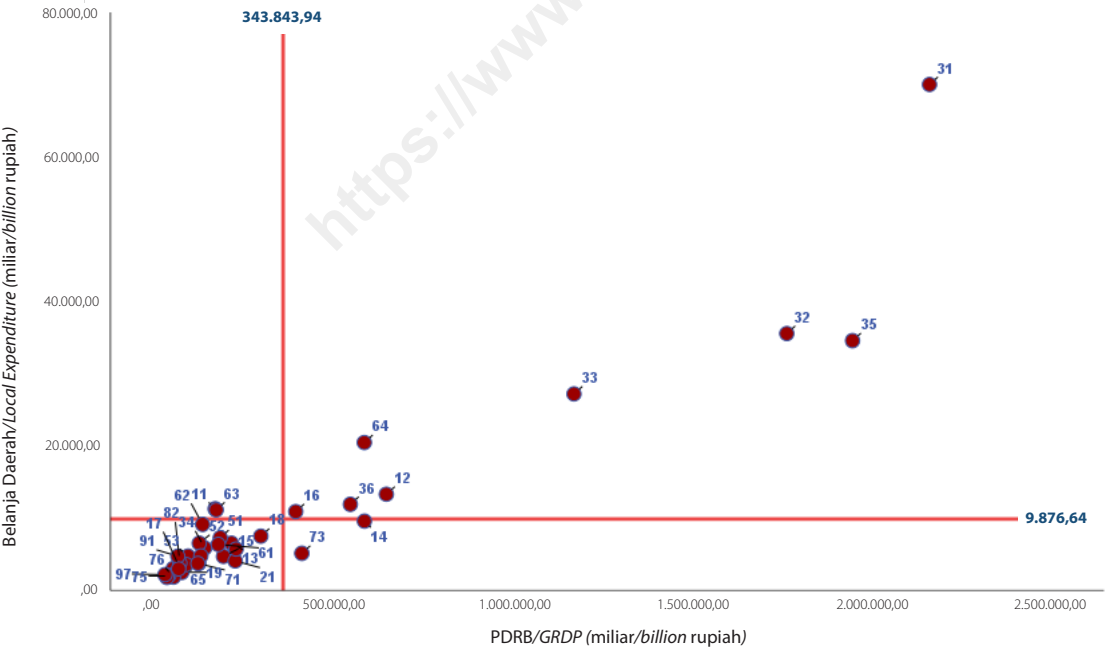
Provinsi yang Berada pada Kuadran III mendominasi pada 2024

Secara umum, hasil pada Gambar 10 terlihat terdapat 3 (tiga) provinsi yang menunjukkan hubungan yang tidak sejalan antara belanja daerah dan PDRB yang dihasilkan pada tahun 2024. Hal ini ditunjukkan melalui provinsi yang masuk dalam kuadran II dan kuadran IV.

generated by the provincial government. The relationship between the two variables can be seen through the quadrant analysis presented in Figure 10.

Provinces in Quadrant III dominates in 2024

The results in Figure 10 show that 3 (three) provinces show an inconsistent relationship between local expenditure and GRDP generated in 2024. This is shown through the provinces included in quadrants II and IV.



Gambar 10 Analisis Kuadran Belanja Pemerintah Provinsi dan PDRB, 2024
Figure 10 Quadrant Analysis of Provincial Government Expenditure and GRDP, 2024



Kuadran II menunjukkan kondisi provinsi yang memiliki nilai total realisasi belanja daerah lebih tinggi dari rata-rata nasional namun memiliki PDRB yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Provinsi yang masuk dalam kuadran ini adalah provinsi Aceh dan Kalimantan Selatan. Hal ini sekaligus menggambarkan belum optimalnya produktivitas dan efektivitas belanja yang direalisasikan oleh pemerintah provinsi Aceh dan Kalimantan Timur karena belanja pemerintah yang dikeluarkan ternyata belum optimal dalam menunjang PDRB yang dihasilkan.

Sebaliknya, kuadran IV menunjukkan kondisi provinsi yang memiliki total realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari rata-rata nasional namun menghasilkan PDRB yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Provinsi yang masuk dalam kuadran ini adalah provinsi Riau dan Sulawesi Selatan. Meskipun PDRB pada kedua provinsi ini sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun ternyata kondisi tersebut tidak diiringi dengan besarnya nilai realisasi belanja daerahnya.

Kondisi tidak ideal ini sekaligus menggambarkan bahwa peran, prioritas dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah provinsi belum optimal dan sejalan dengan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini menjadikan produktivitas dan efektivitas belanja

Quadrant II shows the condition of provinces with a total local expenditure realization value higher than the national average but a GRDP lower than the national average. The provinces included in this quadrant is Aceh and Kalimantan Selatan. This briefly illustrates the less-than-optimal productivity and effectiveness of expenditure realized by the Aceh and Kalimantan Timur provincial government because the government expenditure issued has not been optimal in supporting the GRDP produced.

On the other hand, quadrant IV shows the condition of provinces with a total realization of local expenditure that is lower than the national average but produces a GRDP that is higher than the national average. The provinces included in this quadrant are Riau and Sulawesi Selatan. Although the GRDP in these two provinces is higher than the national average, a large value of local expenditure realization does not accompany this condition.

This non-ideal condition also illustrates that the provincial government's role, priorities and resources could be more optimal and in line with economic activities in the region. This makes the productivity and effectiveness of local expenditure less than optimal.



daerah yang direalisasikan menjadi belum optimal.

Provinsi yang menunjukkan kondisi paling baik adalah yang berada pada kuadran I. Kuadran ini menunjukkan provinsi dengan nilai PDRB yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional dan sekaligus sejalan dengan nilai total realisasi belanja pemerintah provinsi yang juga lebih tinggi dari rata-rata nasional. Terdapat 8 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Banten, dan Sumatera Selatan yang masuk dalam kuadran ini.

Pada 2024 didominasi oleh kondisi provinsi yang masuk dalam kuadran III yaitu sebanyak 26 Provinsi. Kuadran ini menggambarkan kondisi provinsi yang memiliki nilai total realisasi belanja pemerintah provinsi yang lebih rendah dari rata-rata nasional dan nilai PDRB yang lebih rendah juga dari rata-rata nasional.

Meskipun menunjukkan hubungan yang sejalan antara belanja daerah dan PDRB, akan tetapi provinsi yang masuk dalam kuadran ini sebenarnya menunjukkan kondisi yang paling membutuhkan fokus dan perhatian untuk dapat lebih dioptimalkan performanya dalam hal ini realisasi belanja pemerintah provinsi. Optimalnya belanja pemerintah provinsi ini selanjutnya diharapkan juga mampu menunjang peningkatan nilai PDRB wilayah setempat.

The province that shows the best condition is the one in quadrant I. This quadrant shows a province with a GRDP value higher than the national average and simultaneously in line with the total value of provincial government expenditure realization, which is also higher than the national average. There are 8 provinces, namely DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Banten, and Sumatera Selatan, are included in this quadrant.

In 2024, it will be dominated by the conditions of the 26 provinces included in Quadrant III. This quadrant describes the conditions of provinces with a total provincial government expenditure realization lower than the national average and a GRDP value lower than the national average.

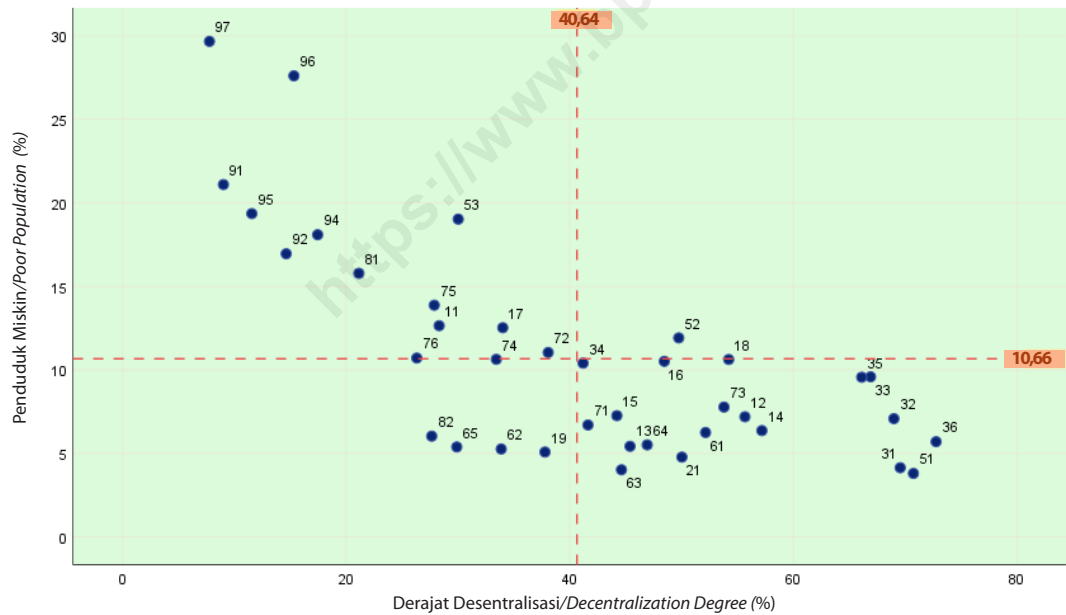
Although it shows a parallel relationship between local expenditure and GRDP, the provinces included in this quadrant actually show conditions that require the most focus and attention to optimize their performance, in this case, the realization of provincial government expenditure. Optimizing provincial government expenditure is also expected to support the increase in the value of the local GRDP.

3.11 Hubungan Derajat Desentralisasi dan Persentase Penduduk Miskin

Desentralisasi diharapkan membantu pemerintah provinsi untuk lebih cepat dan tepat dalam memberantas kemiskinan di daerahnya. Hubungan derajat desentralisasi pemerintah provinsi dengan persentase penduduk miskin terlihat pada gambar 10. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan data untuk 38 provinsi, analisis deskriptif pada gambar

3.11 Relationship between Degree of Decentralization and Percentage of Poor Population

Decentralization is expected to help provincial governments to eradicate poverty in their regions more quickly and precisely. The relationship between the degree of decentralization of provincial governments and the percentage of poor population can be seen in Figure 10. Based on the consideration of data availability for 38 provinces, the descriptive analysis in Figure 10 uses 2024



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 11 Scatter-Plot Derajat Desentralisasi dan Persentase Penduduk Miskin, 2024
Figure Scatter-Plot of Decentralization Degree and Percentage of Poor Population, 2024

10 menggunakan data realisasi 2024 dan Persentase Penduduk Miskin September 2024.

Derajat Desentralisasi dan Persentase Penduduk Miskin Berkorelasi Negatif

Secara umum Gambar 11 menunjukkan adanya hubungan negatif antara derajat desentralisasi dan kemiskinan. Artinya, semakin tinggi target derajat desentralisasi suatu pemerintah provinsi, semakin rendah persentase penduduk miskin di wilayahnya. Selain itu, pada gambar 10 kondisi paling baik terdapat pada kuadran IV yaitu provinsi dengan derajat desentralisasi yang lebih tinggi dari rata-rata dan persentase penduduk miskin lebih rendah dari angka nasional. Sebagian besar provinsi di Indonesia tidak berada pada kondisi ideal pada 2024.

Kondisi tidak ideal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi bukan merupakan faktor utama, melainkan terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kuadran III pada Gambar 11 yaitu provinsi Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung dengan derajat desentralisasi lebih rendah dari rata-rata nasional namun memiliki

realization data 2024 and percentage of poor population data September 2024.

Degree of Decentralization and Percentage of Poor Population Negatively Correlated

Figure 11 shows a negative relationship between the degree of decentralization and poverty. This means that the higher the target degree of decentralization of a provincial government, the lower the percentage of poor population in its region. In addition, in Figure 10, the best conditions are in quadrant IV, namely provinces with a degree of decentralization higher than the average and a percentage of poor people lower than the national figure. Most provinces in Indonesia need to be in better conditions in 2024.

This non-ideal condition indicates that decentralization is not the main factor; instead, other factors influence the decrease in the percentage of poor population in a region. This is shown in quadrant III in Figure 11, namely the provinces of Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, and Bangka Belitung with a lower degree of decentralization than the national average but also a lower percentage of poor people than the national figure.

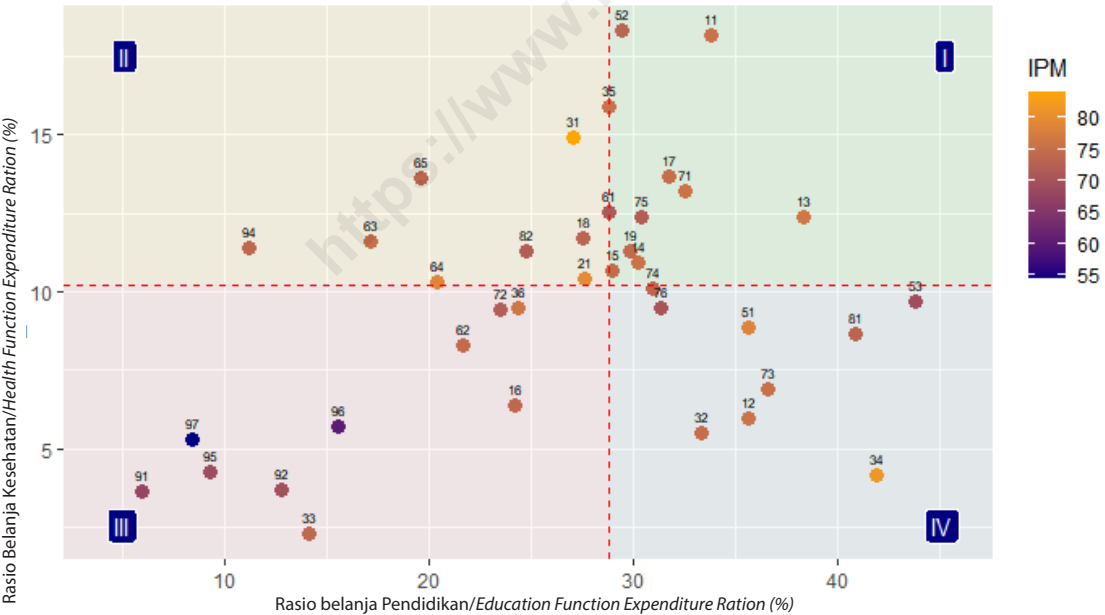
persentase penduduk miskin yang lebih rendah juga dari angka nasional.

3.12 Hubungan Belanja Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan IPM

Belanja menurut fungsi sebagai salah satu indikator untuk melihat arah kebijakan komitmen dan prioritas pemerintah provinsi utamanya dalam hal pembangunan nasional dan kesejahteraan Masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas hidup

3.12 Relationship between Education, Health Functions Expenditure, and Human Development Index

Expenditure functions as one of the indicators to see the direction of the provincial government's commitment and priority policies, especially in terms of national development and community welfare. The Human Development Index (HDI) is one of the indicators that show the provincial government's success in improving its people's quality of life through policies,



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 12 Scatter-Plot Belanja Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, dan IPM, 2024
Figure Scatter-Plot of Education Function, Health Function Expenditure and Human Development Index, 2024

masyarakatnya melalui kebijakan, program dan alokasi belanja yang dikeluarkan. IPM mencerminkan hasil pembangunan manusia yang dilihat dari tiga dimensi utama yaitu kesehatan, Pendidikan, dan standar hidup layak.

Rasio Belanja Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan IPM Berkorelasi Positif

Hubungan rasio belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan IPM pemerintah provinsi disajikan pada Gambar 12. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan data untuk 38 provinsi, analisis deskriptif pada Gambar 12 menggunakan data realisasi dan IPM 2024. Analisis deskriptif ini merupakan pemetaan awal yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara ketiga indikator tersebut

Secara umum, hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif antara belanja fungsi Pendidikan dan kesehatan dengan IPM. Artinya, semakin tinggi rasio belanja fungsi pendidikan dan kesehatan yang terealisasi, maka semakin tinggi pula nilai IPM di provinsi tersebut.

Nilai IPM yang tinggi pada Gambar 12 ditunjukkan melalui gradasi warna orange. Kondisi paling baik terdapat pada kuadran I yaitu provinsi dengan rasio belanja pendidikan lebih dari 20 persen (batas

programs, and spending allocations. The HDI reflects human development results as seen from three main dimensions: health, education, and a decent standard of living.

The Ratio of Education, Health Function Expenditure, and Human Development Index Functions is Positively Correlated

Figure 12 presents the relationship between the provincial government's ratio of education and health function Expenditure with human development index. The descriptive analysis in Figure 12 uses 2024 realization and IPM data, considering data availability for 38 provinces. This descriptive analysis serves as an initial mapping aimed at providing a general overview of the relationships among the three indicators.

In general, the results indicate a positive relationship between spending on education and health functions and the Human Development Index (HDI). This means that the higher the realized ratio of spending on education and health functions, the higher the HDI in that province.

The high HDI value in Figure 12 is shown through the blue color gradation. The best condition is in quadrant I: provinces with an education expenditure ratio of more than 20 percent (minimum limit) and a health



minimum) dan rasio belanja kesehatan lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan gradasi warna biru.

Keterkaitan antara rasio belanja pendidikan, kesehatan dan IPM sangat terlihat di wilayah Indonesia Timur, terutama Provinsi Papua dan provinsi-provinsi baru hasil pemekaran. Selain itu, meskipun provinsi Jawa Tengah yang memiliki IPM tinggi juga berada di kuadran III, hal ini menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki fondasi layanan yang kuat, tata kelola efisien, dan kondisi sosial-ekonomi yang mendukung, sehingga capaian pembangunan manusianya tetap tinggi meski belanja fungsi kesehatan dan pendidikannya relatif kecil.

Beberapa daerah menunjukkan bahwa tingginya rasio belanja pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan capaian IPM. Kondisi ini terlihat di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku yang memiliki rasio belanja pendidikan yang tinggi namun IPM-nya belum maksimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah fasilitas pendidikan saja belum cukup untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan manusia.

Sama halnya dengan persentase penduduk miskin, kondisi tidak ideal ini mengindikasikan bahwa belanja fungsi baik pendidikan maupun kesehatan bukan merupakan satu-satunya faktor penentu,

expenditure ratio higher than the national average with a blue color gradation.

The relationship between the ratio of education and health spending and the HDI is clearly visible in Eastern Indonesia, especially in Papua Province and the newly formed provinces. In addition, although Jawa Tengah—despite having a high HDI—is also located in Quadrant III, this indicates that the province has a strong service foundation, efficient governance, and supportive socio-economic conditions, enabling it to maintain high human development outcomes even with relatively low spending on education and health functions.

Several regions also show that a high ratio of education spending does not always correspond to high HDI achievements. This can be seen in Nusa Tenggara Timur and Maluku, which have high education spending ratios but have not yet achieved optimal HDI levels. These findings indicate that increasing the number of educational facilities alone is not sufficient to improve human development outcomes.

Similarly, when viewed alongside poverty levels, this less-than-ideal condition suggests that spending on education and health functions is not the sole determining factor; other factors also play a significant



melainkan terdapat faktor lain yang juga berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM suatu daerah.

role in raising a region's HDI.

<https://www.bps.go.id>

BAB
CHAPTER
4

TABEL
KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI

*TABLES OF
PROVINCIAL GOVERNMENT
FINANCE*

Tabel 4 **Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Provinsi di Indonesia**
Table **(persen), 2024**
 Revenue Absorption Rate of All Provincial Government in Indonesia
 (percent), 2024

No.	Provinsi Province	Tingkat Penyerapan Pendapatan Revenue Absorption Rate
(1)	(2)	(3)
1.	A c e h	103,37
2.	Sumatera Utara	90,45
3.	Sumatera Barat	98,42
4.	R i a u	94,41
5.	J a m b i	101,30
6.	Sumatera Selatan	105,93
7.	Bengkulu	104,38
8.	Lampung	89,33
9.	Bangka Belitung	94,71
10.	Kepulauan Riau	93,88
11.	DKI Jakarta	100,70
12.	Jawa Barat	102,14
13.	Jawa Tengah	98,31
14.	D I Yogyakarta	103,17
15.	Jawa Timur	112,93
16.	Banten	105,60
17.	B a l i	123,14
18.	Nusa Tenggara Barat	107,12
19.	Nusa Tenggara Timur	93,60
20.	Kalimantan Barat	102,40
21.	Kalimantan Tengah	109,24
22.	Kalimantan Selatan	118,82
23.	Kalimantan Timur	110,42
24.	Kalimantan Utara	111,33
25.	Sulawesi Utara	93,56
26.	Sulawesi Tengah	107,87
27.	Sulawesi Selatan	99,65
28.	Sulawesi Tenggara	103,64
29.	Gorontalo	102,01
30.	Sulawesi Barat	101,43
31.	M a l u k u	96,45
32.	Maluku Utara	95,37
33.	Papua Barat	99,24
34.	Papua Barat Daya	107,12
35.	Papua	98,31
36.	Papua Selatan	103,44
37.	Papua Tengah	97,41
38.	Papua Pegunungan	99,28

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel 5 **Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024**
Table **Expenditure Absorption Rate of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024**

No.	Provinsi Province	Tingkat Penyerapan Belanja Revenue Absorption Rate
(1)	(2)	(3)
1.	A c e h	98,61
2.	Sumatera Utara	89,70
3.	Sumatera Barat	95,70
4.	R i a u	86,99
5.	J a m b i	90,77
6.	Sumatera Selatan	103,87
7.	Bengkulu	100,59
8.	Lampung	90,08
9.	Bangka Belitung	82,99
10.	Kepulauan Riau	93,71
11.	DKI Jakarta	96,43
12.	Jawa Barat	96,64
13.	Jawa Tengah	97,62
14.	D I Yogyakarta	94,76
15.	Jawa Timur	103,90
16.	Banten	100,35
17.	B a l i	105,44
18.	Nusa Tenggara Barat	106,81
19.	Nusa Tenggara Timur	91,56
20.	Kalimantan Barat	94,95
21.	Kalimantan Tengah	103,81
22.	Kalimantan Selatan	95,55
23.	Kalimantan Timur	98,98
24.	Kalimantan Utara	101,95
25.	Sulawesi Utara	102,53
26.	Sulawesi Tengah	99,08
27.	Sulawesi Selatan	96,94
28.	Sulawesi Tenggara	95,84
29.	Gorontalo	100,55
30.	Sulawesi Barat	100,17
31.	M a l u k u	95,74
32.	Maluku Utara	94,34
33.	Papua Barat	93,12
34.	Papua Barat Daya	104,87
35.	Papua	98,84
36.	Papua Selatan	93,82
37.	Papua Tengah	77,29
38.	Papua Pegunungan	97,76

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel 6
Table

Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024
Tax Revenue Ratio of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024

No.	Provinsi Province	Rasio Penerimaan Pajak Tax Revenue Ratio
(1)	(2)	(3)
1.	A c e h	16,94
2.	Sumatera Utara	49,99
3.	Sumatera Barat	36,07
4.	R i a u	44,62
5.	J a m b i	38,92
6.	Sumatera Selatan	43,27
7.	Bengkulu	28,00
8.	Lampung	44,30
9.	Bangka Belitung	33,31
10.	Kepulauan Riau	44,91
11.	DKI Jakarta	60,93
12.	Jawa Barat	63,87
13.	Jawa Tengah	53,87
14.	D I Yogyakarta	35,81
15.	Jawa Timur	53,84
16.	Banten	68,95
17.	B a l i	57,77
18.	Nusa Tenggara Barat	30,89
19.	Nusa Tenggara Timur	25,29
20.	Kalimantan Barat	41,91
21.	Kalimantan Tengah	28,42
22.	Kalimantan Selatan	35,53
23.	Kalimantan Timur	38,81
24.	Kalimantan Utara	22,01
25.	Sulawesi Utara	33,83
26.	Sulawesi Tengah	31,94
27.	Sulawesi Selatan	48,18
28.	Sulawesi Tenggara	25,31
29.	Gorontalo	23,69
30.	Sulawesi Barat	22,16
31.	M a l u k u	17,42
32.	Maluku Utara	23,64
33.	Papua Barat	6,06
34.	Papua Barat Daya	11,36
35.	Papua	11,33
36.	Papua Selatan	10,81
37.	Papua Tengah	14,48
38.	Papua Pegunungan	7,51

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel 7 Derajat Desentralisasi Provinsi di Indonesia (persen), 2024
Table Decentralization Degree of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024

No.	Provinsi Province	Derajat Desentralisasi Decentralization Degree
(1)	(2)	(3)
1.	A c e h	28,31
2.	Sumatera Utara	55,67
3.	Sumatera Barat	45,39
4.	R i a u	57,18
5.	J a m b i	44,21
6.	Sumatera Selatan	48,45
7.	Bengkulu	34,00
8.	Lampung	54,21
9.	Bangka Belitung	37,78
10.	Kepulauan Riau	50,03
11.	DKI Jakarta	69,56
12.	Jawa Barat	68,99
13.	Jawa Tengah	66,91
14.	D I Yogyakarta	41,19
15.	Jawa Timur	66,11
16.	Banten	72,76
17.	B a l i	70,74
18.	Nusa Tenggara Barat	49,75
19.	Nusa Tenggara Timur	30,02
20.	Kalimantan Barat	52,15
21.	Kalimantan Tengah	33,86
22.	Kalimantan Selatan	44,62
23.	Kalimantan Timur	46,92
24.	Kalimantan Utara	29,89
25.	Sulawesi Utara	41,63
26.	Sulawesi Tengah	38,07
27.	Sulawesi Selatan	53,79
28.	Sulawesi Tenggara	33,43
29.	Gorontalo	27,88
30.	Sulawesi Barat	26,31
31.	M a l u k u	21,13
32.	Maluku Utara	27,65
33.	Papua Barat	9,02
34.	Papua Barat Daya	14,63
35.	Papua	17,45
36.	Papua Selatan	11,56
37.	Papua Tengah	15,32
38.	Papua Pegunungan	7,77

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel 8**Table**

Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024
Independence Ratio of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024

No.	Provinsi Province	Rasio Kemandirian Independence Ratio
(1)	(2)	(3)
1.	A c e h	39,49
2.	Sumatera Utara	127,60
3.	Sumatera Barat	83,46
4.	R i a u	133,84
5.	J a m b i	79,94
6.	Sumatera Selatan	94,05
7.	Bengkulu	52,42
8.	Lampung	118,74
9.	Bangka Belitung	60,73
10.	Kepulauan Riau	100,20
11.	DKI Jakarta	234,69
12.	Jawa Barat	222,96
13.	Jawa Tengah	202,85
14.	D I Yogyakarta	70,19
15.	Jawa Timur	196,17
16.	Banten	267,58
17.	B a l i	242,42
18.	Nusa Tenggara Barat	99,00
19.	Nusa Tenggara Timur	42,94
20.	Kalimantan Barat	109,10
21.	Kalimantan Tengah	52,98
22.	Kalimantan Selatan	80,68
23.	Kalimantan Timur	88,58
24.	Kalimantan Utara	42,76
25.	Sulawesi Utara	71,36
26.	Sulawesi Tengah	61,67
27.	Sulawesi Selatan	116,66
28.	Sulawesi Tenggara	50,25
29.	Gorontalo	38,85
30.	Sulawesi Barat	36,27
31.	M a l u k u	26,85
32.	Maluku Utara	38,22
33.	Papua Barat	9,91
34.	Papua Barat Daya	17,43
35.	Papua	21,16
36.	Papua Selatan	13,08
37.	Papua Tengah	23,68
38.	Papua Pegunungan	8,43

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel 9 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024
Table Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024

No.	Provinsi Province	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness
(1)	(2)	(3)
1.	A c e h	106,98
2.	Sumatera Utara	82,13
3.	Sumatera Barat	94,37
4.	R i a u	90,76
5.	J a m b i	94,51
6.	Sumatera Selatan	111,59
7.	Bengkulu	103,25
8.	Lampung	81,82
9.	Bangka Belitung	83,46
10.	Kepulauan Riau	110,53
11.	DKI Jakarta	96,84
12.	Jawa Barat	100,47
13.	Jawa Tengah	96,89
14.	D I Yogyakarta	108,37
15.	Jawa Timur	115,02
16.	Banten	104,12
17.	B a l i	135,86
18.	Nusa Tenggara Barat	106,17
19.	Nusa Tenggara Timur	81,84
20.	Kalimantan Barat	102,69
21.	Kalimantan Tengah	105,19
22.	Kalimantan Selatan	122,13
23.	Kalimantan Timur	105,66
24.	Kalimantan Utara	96,93
25.	Sulawesi Utara	93,32
26.	Sulawesi Tengah	102,68
27.	Sulawesi Selatan	98,44
28.	Sulawesi Tenggara	96,21
29.	Gorontalo	106,96
30.	Sulawesi Barat	98,29
31.	M a l u k u	86,11
32.	Maluku Utara	111,95
33.	Papua Barat	76,09
34.	Papua Barat Daya	195,09
35.	Papua	83,13
36.	Papua Selatan	136,68
37.	Papua Tengah	120,22
38.	Papua Pegunungan	101,82

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel 10 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024
Table Tax Revenue Effectiveness of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024

No.	Provinsi Province	Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Tax Revenue Effectiveness
(1)	(2)	(3)
1.	A c e h	100,08
2.	Sumatera Utara	82,11
3.	Sumatera Barat	91,54
4.	R i a u	96,73
5.	J a m b i	99,20
6.	Sumatera Selatan	110,31
7.	Bengkulu	103,67
8.	Lampung	98,71
9.	Bangka Belitung	84,60
10.	Kepulauan Riau	115,00
11.	DKI Jakarta	96,12
12.	Jawa Barat	100,02
13.	Jawa Tengah	91,85
14.	D I Yogyakarta	106,90
15.	Jawa Timur	113,76
16.	Banten	103,23
17.	B a l i	139,55
18.	Nusa Tenggara Barat	101,57
19.	Nusa Tenggara Timur	88,60
20.	Kalimantan Barat	98,72
21.	Kalimantan Tengah	107,55
22.	Kalimantan Selatan	121,64
23.	Kalimantan Timur	99,76
24.	Kalimantan Utara	93,26
25.	Sulawesi Utara	97,29
26.	Sulawesi Tengah	122,36
27.	Sulawesi Selatan	99,13
28.	Sulawesi Tenggara	87,81
29.	Gorontalo	104,48
30.	Sulawesi Barat	105,19
31.	M a l u k u	102,19
32.	Maluku Utara	128,90
33.	Papua Barat	69,04
34.	Papua Barat Daya	151,46
35.	Papua	79,00
36.	Papua Selatan	194,06
37.	Papua Tengah	115,26
38.	Papua Pegunungan	99,82

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel 11 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024
Table Expenditure to Revenue Ratio of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024

No.	Provinsi Province	Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Expenditure to Revenue Ratio
(1)	(2)	(3)
1.	A c e h	99,04
2.	Sumatera Utara	100,53
3.	Sumatera Barat	100,65
4.	R i a u	100,92
5.	J a m b i	99,46
6.	Sumatera Selatan	99,48
7.	Bengkulu	98,39
8.	Lampung	100,74
9.	Bangka Belitung	103,06
10.	Kepulauan Riau	102,87
11.	DKI Jakarta	95,97
12.	Jawa Barat	96,90
13.	Jawa Tengah	103,06
14.	D I Yogyakarta	94,28
15.	Jawa Timur	97,41
16.	Banten	96,00
17.	B a l i	93,21
18.	Nusa Tenggara Barat	98,54
19.	Nusa Tenggara Timur	97,93
20.	Kalimantan Barat	98,36
21.	Kalimantan Tengah	109,55
22.	Kalimantan Selatan	89,76
23.	Kalimantan Timur	92,66
24.	Kalimantan Utara	103,24
25.	Sulawesi Utara	101,48
26.	Sulawesi Tengah	102,92
27.	Sulawesi Selatan	98,10
28.	Sulawesi Tenggara	97,12
29.	Gorontalo	102,75
30.	Sulawesi Barat	96,01
31.	M a l u k u	98,58
32.	Maluku Utara	97,01
33.	Papua Barat	105,20
34.	Papua Barat Daya	100,14
35.	Papua	110,45
36.	Papua Selatan	104,31
37.	Papua Tengah	88,57
38.	Papua Pegunungan	99,00

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel 12 Rasio Realisasi Belanja Menurut Jenis Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024
Table Expenditure Realization Ratio by Type All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024

No.	Provinsi Province	Rasio / Ratio			
		Belanja Operasi Operating Expenditure	Belanja Modal Capital Expenditure	Belanja Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	Belanja Transfer Transfer Expenditure
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	72,73	11,03	~0	16,24
2.	Sumatera Utara	66,11	15,11	0,29	18,49
3.	Sumatera Barat	70,72	11,73	0,08	17,47
4.	R i a u	62,53	19,69	~0	17,77
5.	J a m b i	61,98	21,12	~0	16,90
6.	Sumatera Selatan	48,67	11,95	~0	39,39
7.	Bengkulu	76,48	13,60	~0	9,92
8.	Lampung	68,80	10,62	0,01	20,57
9.	Bangka Belitung	73,43	9,62	0,03	16,92
10.	Kepulauan Riau	73,36	7,55	0,05	19,04
11.	DKI Jakarta	83,73	15,72	~0	0,55
12.	Jawa Barat	56,22	5,95	~0	37,83
13.	Jawa Tengah	59,16	6,37	0,04	34,43
14.	D I Yogyakarta	63,20	11,60	~0	25,20
15.	Jawa Timur	66,53	6,68	0,41	26,39
16.	Banten	60,23	9,49	~0	30,28
17.	B a l i	61,17	9,16	0,10	29,57
18.	Nusa Tenggara Barat	77,06	7,98	~0	14,96
19.	Nusa Tenggara Timur	73,22	11,28	0,07	15,43
20.	Kalimantan Barat	65,53	15,26	~0	19,20
21.	Kalimantan Tengah	54,97	32,38	0,20	12,45
22.	Kalimantan Selatan	51,64	26,66	0,04	21,66
23.	Kalimantan Timur	45,63	23,80	0,31	30,26
24.	Kalimantan Utara	65,33	19,78	0,21	14,68
25.	Sulawesi Utara	73,31	11,08	0,01	15,60
26.	Sulawesi Tengah	67,13	18,34	~0	14,53
27.	Sulawesi Selatan	67,50	13,10	0,01	19,39
28.	Sulawesi Tenggara	67,80	19,46	0,06	12,68
29.	Gorontalo	78,46	11,11	0,24	10,19
30.	Sulawesi Barat	77,44	11,68	~0	10,88
31.	M a l u k u	77,64	12,64	~0	9,72
32.	Maluku Utara	72,69	17,10	0,07	10,13
33.	Papua Barat	48,16	15,29	0,15	36,40
34.	Papua Barat Daya	57,16	31,60	0,06	11,18
35.	Papua	83,26	10,29	~0	6,45
36.	Papua Selatan	63,90	26,27	2,36	7,47
37.	Papua Tengah	63,31	24,54	0,60	11,55
38.	Papua Pegunungan	66,79	24,79	2,45	5,97

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel 13 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Provinsi di Indonesia (persen), 2024
Table Expenditure Ratio by Function of All Provincial Government in Indonesia (percent), 2024

No.	Provinsi Province	Rasio/Ratio			
		Belanja Pendidikan Education Expenditure		Belanja Kesehatan Health Expenditure	
		Realisasi/Realization 2024	Anggaran/Budget 2025	Realisasi/Realization 2024	Anggaran/Budget 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	33,84	29,11	18,14	18,91
2.	Sumatera Utara	35,67	27,60	5,99	7,08
3.	Sumatera Barat	38,35	38,94	12,39	13,48
4.	R i a u	30,28	33,54	10,94	14,19
5.	J a m b i	29,00	32,19	10,67	13,41
6.	Sumatera Selatan	24,21	27,80	6,38	8,42
7.	Bengkulu	31,75	27,67	13,65	14,78
8.	Lampung	27,57	29,36	11,70	11,00
9.	Bangka Belitung	29,86	30,71	11,28	13,82
10.	Kepulauan Riau	27,62	27,87	10,40	11,68
11.	DKI Jakarta	27,05	24,93	14,88	13,27
12.	Jawa Barat	33,37	38,23	5,51	8,09
13.	Jawa Tengah	14,12	38,06	2,29	13,50
14.	D I Yogyakarta	41,92	44,06	4,19	4,55
15.	Jawa Timur	28,82	31,90	15,86	19,54
16.	Banten	24,39	32,37	9,47	9,74
17.	B a l i	35,62	40,39	8,86	11,46
18.	Nusa Tenggara Barat	29,41	30,48	18,29	20,62
19.	Nusa Tenggara Timur	43,82	48,54	9,70	9,98
20.	Kalimantan Barat	28,82	30,42	12,55	12,68
21.	Kalimantan Tengah	21,66	24,56	8,30	7,99
22.	Kalimantan Selatan	17,16	19,92	11,59	12,74
23.	Kalimantan Timur	20,39	20,57	10,31	9,77
24.	Kalimantan Utara	19,58	23,34	13,60	13,12
25.	Sulawesi Utara	32,52	32,81	13,21	16,22
26.	Sulawesi Tengah	23,49	25,52	9,43	10,09
27.	Sulawesi Selatan	36,60	36,60	6,93	10,17
28.	Sulawesi Tenggara	30,99	37,48	10,08	16,09
29.	Gorontalo	30,39	30,83	12,35	10,42
30.	Sulawesi Barat	31,35	29,18	9,46	9,09
31.	M a l u k u	40,91	38,03	8,68	9,88
32.	Maluku Utara	24,75	25,26	11,28	10,97
33.	Papua Barat	5,91	5,28	3,68	5,57
34.	Papua Barat Daya	12,77	11,41	3,71	6,28
35.	Papua	11,19	12,90	11,37	14,39
36.	Papua Selatan	9,26	12,24	4,29	6,61
37.	Papua Tengah	15,58	17,77	5,74	5,64
38.	Papua Pegunungan	8,39	6,61	5,32	3,49

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

No.	Provinsi Province	Rasio/Ratio			
		Belanja Ekonomi Economy Expenditure		Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Housing and Public Facilities Expenditure	
		Realisasi/Realization 2024	Anggaran/Budget 2025	Realisasi/Realization 2024	Anggaran/Budget 2025
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	A c e h	13,38	12,52	4,52	5,73
2.	Sumatera Utara	14,70	16,95	2,46	2,54
3.	Sumatera Barat	12,02	14,78	3,12	3,54
4.	R i a u	17,25	15,03	7,14	4,05
5.	J a m b i	22,48	12,33	1,89	2,27
6.	Sumatera Selatan	10,26	11,31	1,78	2,27
7.	Bengkulu	13,06	28,09	4,04	1,39
8.	Lampung	13,02	16,83	3,11	3,10
9.	Bangka Belitung	14,85	14,21	1,73	1,68
10.	Kepulauan Riau	9,59	12,59	4,70	4,04
11.	DKI Jakarta	21,03	23,48	4,12	4,48
12.	Jawa Barat	7,68	9,79	1,21	1,47
13.	Jawa Tengah	4,14	6,23	0,52	1,33
14.	D I Yogyakarta	8,80	9,07	2,69	1,57
15.	Jawa Timur	10,21	12,29	1,51	1,82
16.	Banten	12,49	13,74	5,11	5,54
17.	B a l i	9,45	14,40	1,21	2,02
18.	Nusa Tenggara Barat	11,38	9,46	9,19	5,06
19.	Nusa Tenggara Timur	9,86	8,95	0,89	1,20
20.	Kalimantan Barat	15,99	18,05	7,21	5,44
21.	Kalimantan Tengah	36,97	31,22	2,41	3,79
22.	Kalimantan Selatan	27,88	27,80	2,09	1,51
23.	Kalimantan Timur	22,62	23,16	2,84	1,91
24.	Kalimantan Utara	23,63	16,65	3,40	1,90
25.	Sulawesi Utara	12,89	9,59	2,82	2,39
26.	Sulawesi Tengah	26,09	19,06	4,26	4,63
27.	Sulawesi Selatan	14,12	10,23	1,27	2,78
28.	Sulawesi Tenggara	14,34	14,15	5,96	3,62
29.	Gorontalo	15,63	16,19	2,00	2,59
30.	Sulawesi Barat	13,59	18,19	1,89	2,34
31.	M a l u k u	13,74	17,30	1,69	2,01
32.	Maluku Utara	20,35	22,23	3,43	3,15
33.	Papua Barat	19,54	23,80	1,78	2,46
34.	Papua Barat Daya	33,11	30,24	3,10	1,52
35.	Papua	22,28	28,36	3,41	3,00
36.	Papua Selatan	38,38	28,97	3,41	4,26
37.	Papua Tengah	21,78	19,31	5,62	5,37
38.	Papua Pegunungan	31,85	32,13	1,23	2,27

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/ DJPK-Ministry of Finance processed by BPS



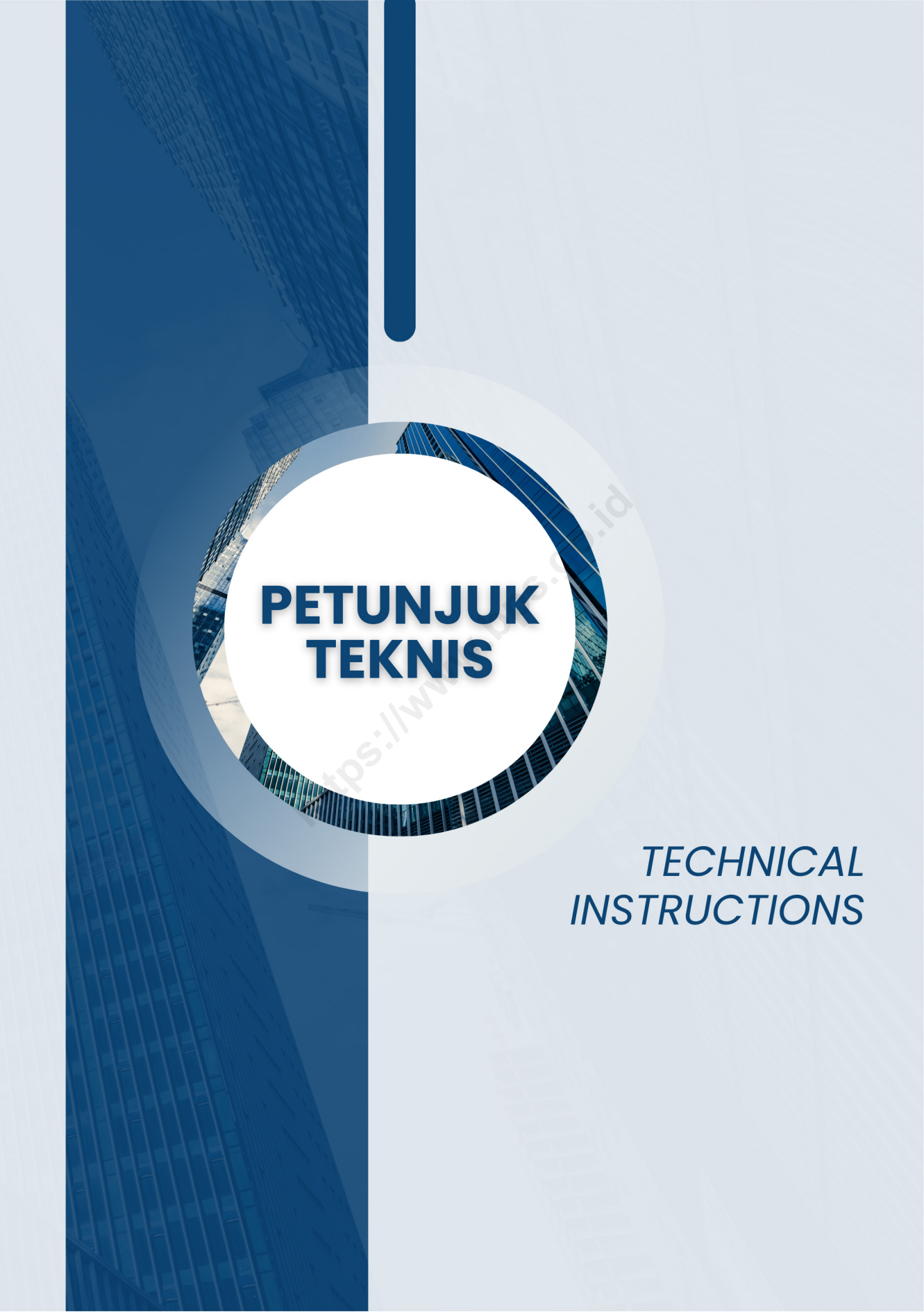
Daftar Pustaka

Bibliography

Mahmudi.2019. *Buku Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat.
Yogyakarta: UPP STIM YPKN.

Maryanti, S, dkk.2023."Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau"*Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*(20):9-18.

<https://www.bps.go.id>



PETUNJUK TEKNIS

*TECHNICAL
INSTRUCTIONS*

Konsep dan Definisi

Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain - lain Pendapatan yang Sah

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

Concept and Definition

Realization of Revenue and Expenditure of Provincial Government is the provincial budget realization for every fiscal year.

1. Local Revenue

Local Revenue consists of:

- a. *Local Own-Source Revenue*
- b. *Transfer Revenue*
- c. *Other Legal Revenue*

- **Local Own-Source Revenue** is revenue that is collected based on local regulations in accordance with legislation, to collect funds for financing local government activities. It consists of local taxes, retributions, revenue of local assets management, and other legal local own-source revenue.
- **Local Taxes** is mandatory contribution that collected based on the local regulations, without getting a direct compensation and being used for regional purpose. Local taxes divided into two categories: 1) local tax that set up by local rule, and 2) state tax that are managed and used



sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

- **Retribusi Daerah** adalah pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** adalah pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.
- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

by the local government. Local tax revenue consists of motor vehicle tax, tax of vehicle ownership transfer, motor vehicle fuel tax, surface water tax, and cigarette tax.

- **Retributions** is revenue that collected based on any services or granting permissions that are specifically provided by the local government for the benefit of an individual or entity.
- **Revenue of Local Assets Management** is revenue that derived from the share of results (Dividends) of Local Governments equity participation in SOEs and ROEs.
- **Other Legal Local Own-Source Revenue** is the local own-source revenue of government that is not included in local taxes, retributions, and revenue of restricted local assets management.
- **Transfer Revenue** is the revenue from other entities report, such as the central government or other autonomous regions in the context of financial balance.

- **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tidak Terduga
 - d. Belanja Transfer
- **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - **Belanja Pegawai** adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
 - **Belanja Barang dan Jasa** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang

- **Other Legal Revenue** is other revenue that coming from the central government and or from the central institution, as well as from other local government. Other legal revenue consists of grant revenue, emergency fund revenue, sharing funds from the province and other local governments, adjustment and special autonomy funds, and financial assistance from the province or other local governments.

2. Local Expenditure

Local Expenditure consists of:

- a. Operating Expenditure
 - b. Capital Expenditure
 - c. Unpredicted Expenditure
 - d. Transfer Expenditure
- **Operating Expenditure** is budget expenditures for daily local government activities that provide short-term benefits.
 - **Personnel Expenditure** is the compensation determined in accordance with the provisions of the legislation given to regional heads/vice regional heads, leaders/members of legislative council (DPRD), and ASN employees (public servants/government employees).
 - **Goods and Services Expenditure** is expenditure used for purchasing/procurement of goods that worth

nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

less than a year (non-durable goods), and or the use of services in carrying out the programs and activities of the local government including goods to be delivered or sold to the public or third parties. Purchasing/ procurement of the goods and services include non-durable goods, materials, office services, insurance premiums, vehicle maintenance, printing and copying, building rent, vehicle rent, heavy equipment rent, leasing of office supplies and equipment, food and beverages, uniforms, certain days uniform, business trip, mutation trip, returning officers, maintenance, consulting services, other procurement of goods/services, and other similar expenditures as well as procurement of goods intended to be delivered or sold to the public or third parties.

- **Belanja Bunga** adalah belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- **Interest Expenditure** is expenditure used to pay debt interest that calculated based on the principal outstanding under the short term, medium term, and long-term agreement.
- **Belanja Subsidi** adalah belanja
- **Subsidy Expenditure** is expenditure



yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- **Belanja Hibah** adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Belanja Bantuan Sosial** adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

that has been budgeted for the provision of subsidies from the regional government so that the selling price of production or services is in accordance with the provisions of laws and regulations so that it can be affordable by the community

- **Grant Expenditure** is expenditure that has been budgeted for granting grants to the central government, other regional governments, state-owned enterprises, ROEs, and/or bodies and institutions, as well as community organizations with Indonesian legal entities, which have been specifically designated, are not mandatory and not binding, and not continuously every fiscal year, unless otherwise specified in accordance with the provisions of the legislation.

- **Social Assistance Expenditure** is expenditure that is budgeted for the provision of assistance in the form of money and/or goods to individuals, families, groups and/or communities that are not continuous and selective in nature which aims to protect from the possibility of social risks, except in certain circumstances it can be sustainable.

- **Belanja Modal** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pembentukan aset tersebut secara rinci meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.
- **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- **Belanja Transfer** adalah pengeluaran uang dari pemerintah
- **Capital Expenditure** is expenditure used for purchasing/procurement preparation of tangible fixed assets whose useful value is more than a year to be used in government activities, such as in the form of land, equipment and machinery, buildings and structures, roads, irrigation and networks, and other fixed assets. The formation of these assets in detail includes land acquisition, heavy equipment, transportation equipment, workshop tools, agricultural equipment, office equipment and supplies, computers, furniture, kitchen utensils, room decorators, studio equipment, tools -communication tools, measuring instruments, medical instruments, laboratory equipment, road construction, bridges, water networks, street lighting, parks and urban forests, electrical and telephone installations, buildings, books/ libraries, art goods, procurement animals/livestock and plants, as well as weapons/security.
- **Unpredicted Expenditure** is expenditure used for emergency needs, including urgent needs that cannot be predicted in advance.
- **Transfer Expenditure** is expenditure from the regional government to other

daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- **Belanja Bagi Hasil** adalah pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- **Belanja Bantuan Keuangan** adalah pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- **Pembiayaan Daerah** adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- **Penerimaan pembiayaan daerah** terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.
- **Pengeluaran pembiayaan** daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,

regional governments and/or from the regional government to the village government.

- **Revenue Sharing Expenditure** *is regional tax revenue sharing to regency/municipality and village governments.*
- **Financial Assistance Expenditure** *is expenditures to other regions in the context of regional cooperation, financial ability improvement equity, and/or other certain objectives.*
- **Local Financing** *is the difference between local financing revenue and local financing expenditure.*
- **Local Financing Revenue** *consists of Last Fiscal Year Budget Surplus, Reserved Fund Disbursement, Revenue of Restricted Local Assets Sales, Local Government Revenue from Loan, Local Government Revenue from Lending, Local Government from regional debt, and return of revolving fund investment.*
- **Local Financing Expenditure** *consists of Establishment of Reserved Fund, Equity (Investment) of Local Government, Principal Repayment,*

pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

and Local Lending.

Metode Penghitungan Indikator

Rumus perhitungan indikator mengacu pada Mahmudi (2019).

1. Tingkat Penyerapan Pendapatan

Penyerapan pendapatan merupakan gambaran keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan anggaran pendapatan. Tingkat penyerapan pendapatan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan 2024}}{\text{Anggaran Pendapatan 2024}} \times 100 \%$$

2. Tingkat Penyerapan Belanja

Penyerapan belanja merupakan gambaran keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja. Tingkat penyerapan belanja dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja 2024}}{\text{Anggaran Belanja 2024}} \times 100 \%$$

Indicator Calculation Method

The indicator calculation formula refers to Mahmudi (2019).

1. Revenue Absorption Rate

Revenue absorption is an illustration of the government's success in realizing the revenue budget. The revenue absorption rate can be calculated using the following formula:

$$\frac{\text{Revenue Realization 2024}}{\text{Revenue Budget 2024}} \times 100\%$$

2. Expenditure Absorption Rate

Expenditure absorption shows the government's success in realizing the expenditure budget. The expenditure absorption rate can be calculated using the following formula:

$$\frac{\text{Expenditure Realization 2024}}{\text{Expenditure Budget 2024}} \times 100 \%$$

3. Rasio Penerimaan Pajak

Rasio penerimaan pajak dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap total pendapatan. Rasio ini dapat menunjukkan kontribusi pajak dalam pendapatan suatu daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak 2024}}{\text{Realisasi Total Pendapatan 2024}} \times 100 \%$$

4. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD 2024}}{\text{Realisasi Total Pendapatan 2024}} \times 100 \%$$

3. Tax Revenue Ratio

The tax revenue ratio is calculated by comparing the realization of tax revenue to total revenue. This ratio can show the contribution of tax to the revenue of a region. This ratio is formulated as follows:

$$\frac{\text{Tax Revenue Realization 2024}}{\text{Revenue Realization 2024}} \times 100 \%$$

4. Degree of Decentralization

The degree of decentralization is calculated by comparing the amount of original regional income and the total regional revenue. This ratio shows the degree of PAD contribution to the total regional revenue. The higher the PAD contribution, the higher the regional government's ability to implement decentralization. This ratio is formulated as follows:

$$\frac{\text{PAD Realization 2024}}{\text{Revenue Realization 2024}} \times 100 \%$$

5. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD 2024}}{\text{Realisasi Transfer 2024}} \times 100 \%$$

6. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi penerimaan PAD dibagi dengan jumlah anggaran PAD. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin efektif pengelolaan PAD-nya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD 2024}}{\text{Anggaran PAD 2024}} \times 100 \%$$

5. Independence

Ratio

The regional financial independence ratio is calculated by comparing the amount of Regional Original Income divided by the amount of transfer income. The higher the ratio, the higher the regional government's financial independence. This ratio is formulated as follows:

$$\frac{\text{PAD Realization 2024}}{\text{Transfer Realization 2024}} \times 100 \%$$

6. PAD Effectiveness Ratio

The PAD effectiveness ratio is calculated by comparing the amount of PAD revenue realization divided by the amount of the PAD budget. The higher the ratio, the more effective the local government manages its PAD. This ratio is formulated as follows:

$$\frac{\text{PAD Realization 2024}}{\text{PAD Budget 2024}} \times 100 \%$$

7. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Rasio efektivitas penerimaan pajak dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi penerimaan pajak dibagi dengan jumlah anggaran penerimaan pajak. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin efektif dalam penerimaan pajak. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak 2024}}{\text{Anggaran Penerimaan Pajak 2024}} \times 100 \%$$

8. Rasio Belanja terhadap Pendapatan

Rasio belanja terhadap pendapatan dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja daerah dibagi dengan jumlah pendapatan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin sehat pengelolaan belanja pemerintah daerah berdasarkan kapasitas pendapatannya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja 2024}}{\text{Realisasi Pendapatan 2024}} \times 100 \%$$

7. Tax Revenue Effectiveness Ratio

The tax revenue effectiveness ratio is calculated by comparing the amount of tax revenue realization divided by the amount of tax revenue budget. The higher the ratio, the more influential the local government is in tax revenue. This ratio is formulated as follows:

$$\frac{\text{Tax Revenue Realization 2024}}{\text{Tax Revenue Budget 2024}} \times 100 \%$$

8. Expenditure to Revenue Ratio

The expenditure-to-revenue ratio is calculated by comparing the amount of regional expenditure realization divided by the amount of regional income. The higher the ratio, the healthier the management of regional government expenditure based on its income capacity. This ratio is formulated as follows:

$$\frac{\text{Expenditure Realization 2024}}{\text{Revenue Realization 2024}} \times 100 \%$$

9. Rasio Belanja Menurut Jenis

Rasio belanja menurut jenis dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja menurut jenis dibagi dengan jumlah belanja daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan fokus belanja tertinggi pemerintah provinsi apakah untuk belanja operasi, modal, transfer, dan belanja tidak terduga. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi 2024}}{\text{Realisasi Total Belanja 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal 2024}}{\text{Realisasi Total Belanja 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Terduga 2024}}{\text{Realisasi Total Belanja 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Transfer 2024}}{\text{Realisasi Total Belanja 2024}} \times 100 \%$$

9. Expenditure Ratio by Type

The expenditure ratio by type is calculated by comparing the amount of expenditure realization by type divided by the amount of local expenditure. The higher the ratio, the higher the focus of the provincial government's highest expenditure, whether for operational expenditure, capital, transfers, or unexpected expenditure. This ratio is formulated as follows:

$$\frac{\text{Operating Expenditure Realization 2024}}{\text{Expenditure Realization 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Capital Expenditure Realization 2024}}{\text{Expenditure Realization 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Unpredicted Expenditure Realization 2024}}{\text{Expenditure Realization 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Transfer Expenditure Realization 2024}}{\text{Expenditure Realization 2024}} \times 100 \%$$

10. Rasio Belanja Menurut Fungsi

Rasio belanja menurut jenis dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja menurut fungsi dibagi dengan jumlah belanja daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan arah kebijakan dan prioritas pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pendidikan 2024}}{\text{Realisasi Total Belanja 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Kesehatan 2024}}{\text{Realisasi Total Belanja 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Ekonomi 2024}}{\text{Realisasi Total Belanja 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Perumahan & Fasilitas Umum 2024}}{\text{Realisasi Total Belanja 2024}} \times 100 \%$$

10. Expenditure Ratio by Function

The expenditure ratio by function is calculated by comparing the amount of expenditure realization by function divided by the amount of local expenditure. The higher the ratio, the more it indicates the direction of provincial government policy and priorities. This ratio is formulated as follows:

$$\frac{\text{Education Expenditure Realization 2024}}{\text{Expenditure Realization 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Health Expenditure Realization 2024}}{\text{Expenditure Realization 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Economy Expenditure Realization 2024}}{\text{Expenditure Realization 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Housing and Public Facilities Expenditure Realization}}{\text{Expenditure Realization 2024}} \times 100 \%$$

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-STATISTICS INDONESIA

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

